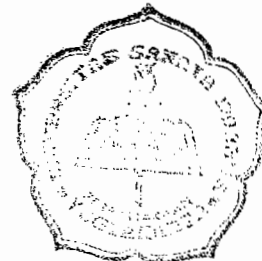


ANALISA LAPORAN KEUANGAN
UNTUK MENILAI PERKEMBANGAN PERUSAHAAN
STUDI KASUS PADA PT. KERETA API (PERSERO) DAOP VI YOGYAKARTA
TAHUN 1997 – 2000

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

WIENA HERIADI

NIM : 962114049

NIRM : 960051121303120196

Program Studi Akuntansi
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2002

SKRIPSI

ANALISA LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI PERKEMBANGAN PERUSAHAAN

STUDI KASUS PADA PT KERETA API INDONESIA DAOP VI YOGYAKARTA
TAHUN 1997 - 2000

OLEH :

WIENA HERIADI

NIM : 962114049

NIRM : 960051121303120196

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I

tanggal : 14 Maret 2002



(Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Ak)

Pembimbing II

tanggal : 9 April 2002



(Drs. FA. Joko Siswanto, MM., Ak)

SKRIPSI
ANALISA LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI
PERKEMBANGAN PERUSAHAAN

STUDI KASUS PADA PT KERETA API INDONESIA DAOP VI YOGYAKARTA
TAHUN 1997 – 2000

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

WIENA HERIADI

NIM : 962114049
NIRM : 960051121303120196

Telah dipertahankan didepan Panitia Penguji
pada tanggal : 22 Mei 2002
dan dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda tangan
Ketua	Dra. YF. Gien Agustinawansari, M.M. Ak	
Sekretaris	Ir. Drs. Hansiadi YH, M.si.,Ak	
Anggota	Drs. YP. Supardiyono, M.si.,Ak	
Anggota	Drs. FA. Joko Siswanto, M.M.,Ak	
Anggota	Drs. P. Rubiyatno, M.M	

Yogyakarta, 24 Mei 2002

Fakultas ekonomi
Sanata Dharma




Hg. Suseno TW.,Ms

MOTTO

- . TAK ADA SESUATU YANG LEBIH MENYENANGKAN DARIPADA MENIMBULKAN SENYUM PADA WAJAH ORANG LAIN TERUTAMA PADA WAJAH ORANG YANG KITA CINTAI.

(R.A. KARTINI)

KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- . KEDUA ORANG TUAKU
- . ADIK-ADIKKU
- . KEKASIHKU

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 14 Maret 2002

Penulis



(WIENA HERIADI)

ABSTRAK

ANALISA LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI PERKEMBANGAN PERUSAHAAN STUDI KASUS PADA PT KERETA API (PERSERO) DAOP VI YOGYAKARTA TAHUN 1997 – 2000

**WIENA HERIADI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2002**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan keuangan perusahaan secara keseluruhan yang menunjukkan tingkat kesehatan keuangan perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 198/KMK.016/1998 pada aspek keuangannya selama periode empat tahun dari 1997 sampai dengan 2000.

Penelitian ini dilaksanakan pada PT Kereta Api (persero) DAOP VI Yogyakarta. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa penilaian kinerja perusahaan menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 198/KMK.016/1998 pada aspek keuangannya saja untuk menilai perkembangan keuangan perusahaan.

Hasil dari analisa yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 1997 sampai dengan 1999 kinerja keuangan perusahaan dalam kondisi kurang baik, sedangkan pada tahun 2000 kinerja keuangan dalam kondisi baik. Dalam hal ini kinerja total bobot nilai 1997 sebesar 17,5, tahun 1998 sebesar 21,5, tahun 1999 sebesar 17,9 dan tahun 2000 sebesar 42.

ABSTRACT

FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS AS A MEANS TO ESTIMATE THE DEVELOPMENT OF COMPANY

A CASE STUDY AT PT KERETA API (PERSERO) DAOP VI YOGYAKARTA

WIENA HERIADI
SANATA DHARMA UNIVERSITY
YOGYAKARTA
2002

The objectives of this research were to know the company's financial performance, based on the decree of Minister of Finance No. 198/KMK.016/1998, in the financial aspect, during four years period from 1997 to 2000.

This research was done at PT Kereta Api (persero) DAOP VI Yogyakarta. The data collecting techniques used were observation, interview and documentation study. The technique of analysis used in evaluating the company was performance technique, according to the decree of Minister of Finance No. 198/KMK.016/1998 to evaluate the whole of the company financial.

From the analysis, the research concluded that from 1997 to 1999, the company financial performance was in bad condition. In 2000 the company's financial was in good condition. In this case, the total performance in 1997 was 17,5 , 21,5 in 1998, 17,9 in 1999 and 42 in 2000.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisa Laporan Keuangan Untuk Menilai Perkembangan Perusahaan” studi kasus pada PT Kereta Api (persero) DAOP VI Yogyakarta.

Skripsi ini ditulis guna melengkapi persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan pada program studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Hg. Suseno TW.,M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Bapak Drs. YP. Supardiyono, M.Si.,Ak., selaku pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing I yang sabar membimbing dan memberi masukan, saran dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. FA. Joko Siswanto, MM., Ak., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing dan banyak membantu dalam memberi saran dan masukan.
4. Bapak Firdaus selaku Kepala Seksi Akuntansi PT Kereta Api Indonesia DAOP VI Yogyakarta, yang telah memberikan ijin penelitian serta menyediakan data – data yang diperlukan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Orang tuaku, adik-adikku dan kekasihku yang telah memberikan semangat dan dorongan baik moril maupun materil yang begitu besar kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kendy Wiguna yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku: Lia, Lusi, Wonny, dan teman-teman di Ampel 16 Papringan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan diterima dengan senang hati.

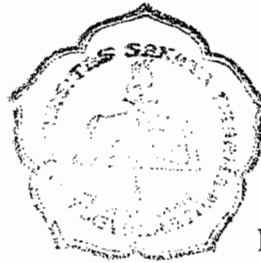
Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Yogyakarta, 14 Maret 2002



Penulis

DAFTAR ISI



	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERTUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	2
C. Perumusan Masalah	2
D. Tujuan Penelitian	3
E. Manfaat Penelitian	3
F. Sistematika Penulisan	3
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Laporan Keuangan	6
1. Pengertian Laporan Keuangan	6
2. Tujuan Laporan Keuangan	8
3. Analisa Laporan Keuangan	9
B. Rasio Keuangan	14
C. Pengertian Sehat Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 198/KMK.016/1998	19
D. Analisa Tingkat Kesehatan Perusahaan	20

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Tempat dan Waktu Penelitian	23
C. Subjek dan Objek Penelitian	23
D. Teknik Pengumpulan Data	24
E. Data Yang Diperlukan	24
F. Teknik Analisis Data	25
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	28
A. Sejarah singkat Perusahaan	28
B. Misi, Visi dan Budaya Perusahaan	31
C. Strategi Perusahaan dan Sasaran Strategi Perusahaan	32
D. Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan	34
E. Struktur Organisasi	35
BAB V PEMBAHASAN	41
A. Deskripsi Data	41
B. Analisa Data	41
1. Analisa Rasio Laporan Keuangan Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 198/KMK.016/1998	42
2. Penilaian Kinerja Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 198/KMK.016/1998 yang diukur melalui Tingkat Keuangan Perusahaan	55
C. Pembahasan	60
BAB VI PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Keterbatasan Penelitian	73
C. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel V.1 Perhitungan Tingkat Imbalan Pemegang Saham	43
Tabel V.2 Perhitungan Tingkat Imbalan Investasi	45
Tabel V.3 Perhitungan Tingkat Rasio kas (<i>cash ratio</i>).....	47
Tabel V.4 Daftar Perhitungan Rasio Lancar	48
Tabel V.5 Daftar Tingkat Perputaran Piutang	50
Tabel V.6 Daftar Tingkat Perputaran Persediaan	51
Tabel V.7 Daftar Perputaran Total asset (<i>Total Asset Turnover</i>) ..	53
Tabel V.8 Daftar Tingkat Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Struktur Organisasi PT Kereta Api (persero)	
DAOP IV Yogyakarta	40

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Daftar Pertanyaan	75
Lampiran 2 Laporan Laba/Rugi PT KERETA API (Persero) Daop VI Yogyakarta tahun 1997 – 2000	77
Lampiran 3 Neraca PT KERETA API (Persero) Daop VI Yogyakarta tahun 1997 – 2000	79
Lampiran 4 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 198/KMK.016/1998 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menghadapi masa-masa sulit yang disebabkan oleh krisis ekonomi seperti sekarang ini, dunia usaha diharapkan dapat dikelola secara profesional sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Kelangsungan hidup perusahaan ditandai dengan kemampuan manajemen dalam melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta dapat memanfaatkan peluang di masa yang akan datang. Pemilihan strategi yang tepat sesuai situasi merupakan dasar untuk membentuk masa depan perusahaan.

Pada umumnya setiap perusahaan mempunyai tujuan pokok. Adapun tujuan pokok perusahaan itu adalah memperoleh laba yang optimal, meningkatkan volume penjualan, meningkatkan harga saham, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan di masa mendatang (Suwarsono, 1994).

Salah satu ukuran menilai berhasil atau tidaknya manajemen dalam menjalankan perusahaan adalah dengan menilai keadaan keuangan dan modal yang dimiliki perusahaan. Dengan menggunakan analisis rasio laporan keuangan, analis dapat menilai kinerja perusahaan yang dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/KMK.016/1998.

Pentingnya Laporan keuangan, bagi kalangan intern (dalam) perusahaan maupun kalangan ekstern (luar) perusahaan, yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan yang tercermin melalui tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Informasi tentang kesehatan perusahaan ini masih kurang karena setiap perusahaan hanya berpatokan pada laporan keuangan, yang disusun setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada perkembangan perusahaan terutama dalam usaha menjaga kelangsungan hidup perusahaan.

Dengan mengadakan analisis laporan keuangan perusahaan, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan suatu perusahaan akan dapat mengetahui kondisi kesehatan dari perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan perusahaan antara lain para pemegang saham, manajer perusahaan yang bersangkutan, para kreditur, para bankir, para investor dan pemerintah dimana perusahaan itu berdomisili.

B. Batasan Masalah

Pengukuran tingkat kesehatan keuangan perusahaan menggunakan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 198/KMK.016/1998, ditinjau dari aspek keuangannya saja.

C. Perumusan Masalah

Bagaimanakah perkembangan keuangan perusahaan selama tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 198/KMK.016/1998?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perkembangan perusahaan dalam tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 198/KMK.016/1998 ditinjau dari aspek keuangan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan yang bersangkutan

Perusahaan diharapkan memperoleh sumbangan pemikiran dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang dan sebagai pertimbangan dalam menyusun rencana-rencana tahun berikutnya.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Memberi tambahan perpustakaan mengenai analisa laporan keuangan.

3. Bagi penulis

Memperoleh gambaran nyata tentang dunia usaha sehingga lebih mendalami ilmu yang telah diperoleh.

F. Sistematika Penulisan

Bab I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. LANDASAN TEORI

Bab ini berisi pengertian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, analisis laporan keuangan, macam-macam ratio keuangan, pengertian sehat menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.198/KMK.016/1998 dan analisis tingkat kesehatan perusahaan.

Bab III. METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, data yang diperlukan dan teknik analisis data.

Bab IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi sejarah berdirinya perusahaan, misi dan visi perusahaan, strategi perusahaan dan sasaran strategi perusahaan, tugas pokok dan fungsi perusahaan serta struktur organisasi.

Bab V. PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis data yang diperoleh dari perusahaan dengan menggunakan metode dan teknik yang diuraikan dalam metode penelitian serta tata cara penilaian tingkat kesehatan perusahaan

(BUMN non jasa keuangan) menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 198/KMK.016/1998.

Bab VI. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang ada, keterbatasan penelitian serta akan menyampaikan saran-saran yang sekiranya dapat berguna bagi perusahaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku. Laporan keuangan ini dibuat manajemen dengan tujuan mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan oleh pemilik perusahaan (Zaki Baridwan,1993:17).

Laporan keuangan terdiri dari neraca dan laporan laba rugi.

Unsur-unsur neraca terdiri dari :

1. Aktiva

Rekening aktiva terdiri dari aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud dan aktiva lain-lain.

2. Hutang

Rekening hutang terdiri dari hutang lancar, hutang jangka panjang dan hutang lain-lain.

3. Modal atau ekuitas

Rekening modal atau ekuitas terdiri dari modal atau ekuitas dari setoran pemilik dan modal atau ekuitas dari operasi yang tidak dibagikan kepada para pemilik.

Unsur-unsur laporan laba-rugi terdiri :

1. Pendapatan

Rekening pendapatan terdiri dari pendapatan yang berasal dari usaha pokok dan pendapatan luar usaha.

2. Biaya

Rekening biaya terdiri dari biaya yang terjadi dalam rangka menjalankan usaha pokok perusahaan dan biaya di luar biaya pokok perusahaan.

Unsur laporan keuangan yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan modal sedangkan unsur yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba adalah penghasilan dan biaya (beban). Posisi keuangan perusahaan biasanya disajikan dalam neraca sedangkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (kinerja) disajikan dalam laporan laba rugi. Neraca adalah laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan (aktiva, kewajiban dan modal) perusahaan pada saat tertentu. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai kemampuan (potensi) perusahaan dalam menghasilkan laba (kinerja) dalam periode tertentu (Dwi Prastowo,1995:5).

Agar pembaca laporan keuangan memperoleh gambaran yang jelas, maka laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim. Di Indonesia prinsip akuntansi disusun oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).

Laporan keuangan mempunyai empat karakteristik kualitatif pokok yang dapat membantu pemakai yaitu, dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan (IAI,1995:9). Maksud dari karakteristik kualitatif tersebut adalah :

1. Dapat dipahami

Laporan keuangan mempunyai kualitas apabila mudah dipahami oleh pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2. Relevan

Informasi laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila dapat membantu pemakai dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa sekarang dan masa depan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

3. Keandalan

Laporan keuangan memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan merupakan penyajian yang jujur.

4. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan perusahaan antar periode harus dapat dibandingkan untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI,1995:5).

Tujuan laporan keuangan dibagi 2 yaitu (APB Statement No. 4 (AICPA)).

Tujuan Umum

Menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang diterima.

Tujuan Khusus

Memberikan informasi tentang kekayaan, kewajiban, kekayaan bersih atau proyeksi laba, perubahan kekayaan dan kewajiban serta informasi lainnya yang relevan.

3. Analisa Laporan Keuangan

Analisa laporan keuangan adalah proses penentuan ciri-ciri keuangan dan operasi suatu perusahaan yang diperoleh dari data akuntansi dan laporan keuangan lainnya (Sarwoko dan Abdul Halim, 1989:49).

Leopoldt A. Berntein berpendapat bahwa analisa laporan keuangan adalah suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil evaluasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu. Tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk mengetahui kondisi dan prestasi yang telah dicapai perusahaan, yang digambarkan melalui catatan-catatan dan laporan-laporan keuangan.

Dalam melakukan analisis keuangan, data yang diambil dari laporan keuangan pokok yaitu neraca dan laba rugi yang biasanya disajikan dalam satu tahun (Suad Husnan, 1996: 350).

1. Neraca**1.1. Pengertian Neraca**

Adalah laporan keuangan yang melaporkan jumlah kekayaan, kewajiban keuangan dan modal sendiri pada waktu tertentu (Sud Husnan, 1996:36).

Neraca akan memberikan informasi tentang likuiditas, fleksibilitas finansial perusahaan yang dipakai sebagai dasar untuk membuat prediksi terhadap keadaan finansial di masa yang akan datang (Harnanto, 1982:56).

1.2. Unsur-Unsur Neraca

Rekening-rekening neraca dibagi 3 golongan utama, yaitu:

1. Aktiva

Aktiva merupakan jumlah uang yang dinyatakan atas sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan baik berupa uang, barang dan hak-hak yang dijamin oleh undang-undang atau pihak tertentu yang timbul dari transaksinya atau peristiwa dari masa lalu. Rekening aktiva meliputi :

a) Aktiva lancar

Aktiva lancar adalah suatu aktiva yang manfaat ekonominya diharapkan dapat diperoleh dalam waktu satu tahun atau kurang atau satu siklus operasi normal perusahaan.

Contoh: Kas, Surat berharga, Persediaan, Piutang wesel, Piutang dagang dan Persekot biaya (Dwi Prastowo,1995:16).

b) Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang adalah penanaman modal yang biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan tetap atau untuk menguasai perusahaan lain dan jangka waktunya lebih dari satu tahun, misalnya: Investasi saham, Investasi obligasi.

c) Aktiva tetap

Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak, aktiva tersebut digunakan dalam operasi yang bersifat permanen dan mempunyai umur kegunaan jangka panjang atau tidak habis dipakai dalam satu periode kegiatan perusahaan, misalnya: tanah, gedung, kendaraan, mesin dan peralatan (S. Munawir, 1984:16).

d) Aktiva tidak berwujud

Aktiva tidak berwujud adalah kekayaan perusahaan yang tidak mempunyai substansi fisik dan biasanya berupa hak atau hak istimewa yang memberi manfaat ekonomi bagi perusahaan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun, misalnya : *patent*, *goodwill*, *royalty*, *copyright* (hak cipta), *trademark* (merek dagang), *franchise*, dan *license*.

e) Aktiva lain-lain

Aktiva lain-lain adalah aktiva yang tidak dapat dimasukkan kedalam salah satu dari empat substansi tersebut, misalnya : beban ditangguhkan, piutang pada direksi.

Rekening-rekening tersebut disajikan berdasarkan urutan likuiditasnya.

2. Hutang

Hutang merupakan jumlah uang yang dinyatakan atau kewajiban-kewajiban untuk menyerahkan uang, barang dan jasa kepada pihak lain di masa yang akan datang yang mempengaruhi perusahaan di masa lalu.

Rekening hutang meliputi: (S. Munawir,1984:18)

a) Hutang lancar

Hutang lancar adalah kewajiban keuangan yang penyelesaiannya diharapkan akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dan pembayarannya akan dilakukan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang , misalnya; hutang dagang, hutang wesel, hutang gaji dan upah, hutang pajak dan hutang biaya.

b) Hutang jangka panjang

Hutang jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang penyelesaiannya diharapkan akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, misalnya hutang obligasi, hutang hipotik dan hutang bank.

c) Hutang lain-lain

Hutang lain-lain adalah kewajiban yang tidak dapat dikategorikan kedalam salah satu subklasifikasi kewajiban tersebut, misalnya: hutang kepada direksi.

3. Modal atau Ekuitas

Modal merupakan sisa hak atas aktiva di dalam perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh hutang-hutangnya. Rekening modal dapat disubklasifikasikan menjadi : (Dwi Prastowo,1995:18)

- a) Modal atau Ekuitas dari setoran pemilik, misalnya : modal saham termasuk agio saham.
- b) Modal atau Ekuitas dari operasi yang tidak dibagikan kepada para pemilik, misalnya dalam bentuk deviden.

Rekening-rekening tersebut dikelompokkan berdasarkan sifat kekekalannya.

2.Laporan Laba Rugi

2.1. Pengertian Laporan Laba Rugi

Adalah laporan keuangan yang menunjukkan pendapat dari penjualan, berbagai biaya, dan biaya yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu (Suad Husnan, 1996:37).

2.2. Unsur-Unsur Laporan Laba Rugi

Rekening-rekening laporan laba rugi dibagi dalam 2 golongan yaitu: (Harnanto, 1982:38)

1. Pendapatan

Adalah sumber-sumber ekonomi yang diterima oleh perusahaan dari transaksi penjualan dan penyerahan jasa-jasa kepada pihak lain. Dari sumbernya, pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan yang berasal dari usaha pokok.
- b. Pendapatan luar usaha.

2. Biaya

Adalah bagian dari harga pokok aktiva tetap, bahan baku, bahan penolong, sparepart, bagian-bagian lainnya dan jasa lain yang digunakan untuk merealisasikan pendapatan dalam suatu periode akuntansi. Dalam hubungannya dengan jenis usaha perusahaan biaya diklasifikasikan menjadi:

- a. Biaya-biaya yang terjadi dalam rangka menjalankan usaha pokok perusahaan yang meliputi HPP dan biaya usaha.
- b. Biaya di luar biaya pokok perusahaan yang meliputi biaya sewa, biaya bunga dan biaya lain-lain yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan di luar usaha.

B. Rasio Keuangan

Dilihat dari sumbernya: (Bambang Riyanto, 1998)

1. Rasio Neraca (*Balance Sheet Ratio*)

lalah ratio-ratio yang disusun dari data yang berasal dari neraca.

Misal: *current ratio*, *acid test ratio*, *current assets to total asset ratio* dan lain sebagainya.

2. Ratio-ratio Laporan Laba Rugi (*Income Statement Ratio*)

Ialah ratio yang disusun dari data yang berasal dari laporan keuangan.

Misal: *Gross Profit Margin*, *Net Operating Margin*, *Operating Ratio* dan lain sebagainya.

3. Ratio-ratio Antar Laporan (*Inter Statement Ratio*)

Ialah ratio yang disusun dari data yang berasal dari neraca laporan laba rugi misalnya: *assets turnover*, *inventory turnover*, *receivable*.

Penggolongan Ratio Lainnya

1. Ratio Likuiditas

Likuiditas yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Rasio yang umumnya dipakai untuk mengukur tingkat likuiditas adalah: (Lukman Syamsuddin, 1987:39)

a. *Current Ratio*

Merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Tingkat likuiditas dapat ditingkatkan dengan jalan :

- Dengan hutang lancar tertentu, diusahakan menambah aktiva lancar.
- Dengan aktiva lancar tertentu, diusahakan mengurangi hutang lancar.

- Dengan mengurangi jumlah hutang lancar bersama-sama dengan mengurangi aktiva lancar.

Current Ratio kurang dari 2:1 atau 200% dianggap kurang baik, sebab apabila aktiva lancar turun, misalnya sampai lebih 50%, maka jumlah aktiva lancarnya tidak akan cukup lagi untuk menutup hutang lancarnya.

Pedoman *current ratio* 2:1, sebenarnya hanya didasarkan pada prinsip hati-hati. Dengan demikian pedoman *current ratio* 200%, bukanlah pedoman yang mutlak (Bambang Riyanto,1998:26).

b. *Quick Ratio (Acid Test Ratio)*

Merupakan perbandingan antara aktiva lancar yang sangat likuid (yang mudah dicairkan atau diuangkan) dengan hutang lancar, dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Quick ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Quick ratio dirancang untuk mengukur seberapa baik perusahaan dapat memenuhi kewajibannya tanpa harus melikuidasi atau terlalu tergantung pada persediaannya. Persediaan tidak bisa sepenuhnya diandalkan, karena persediaan bukanlah sumber kas yang bisa segera diperoleh dan bahkan mungkin tidak mudah dijual pada kondisi ekonomi yang lesu (Dwi Prastowo,1995:58).

Quick ratio kurang dari 1:1 atau 100% dianggap kurang baik tingkat likuiditasnya, bila *quick ratio* digunakan untuk menentukan tingkat likuiditas (Bambang Riyanto,1998:28).

Bila terjadi perbedaan yang sangat besar antara *current ratio* dengan *quick ratio* dimana *current ratio* tinggi sedangkan *quick ratio* rendah, hal ini berarti terjadi investasi yang besar pada pos aktiva lancar yang illikuid.

2. Ratio Solvabilitas

Solvabilitas berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya (baik jangka pendek maupun jangka panjang) pada saat dilikuidasi (Bambang Riyanto, 1995:30). Pengukuran solvabilitas yaitu:

$$a. \text{ Total Assets to Total debt ratio} = \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Hutang}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan sejumlah hutang dijamin dengan sejumlah aktiva yang dimilikinya. Rasio ini minimal sebesar 100% atau 1:1, jadi perusahaan harus mengusahakan agar rasio total aktiva atau total hutang diatas 100%.

Semakin besar rasio ini berarti semakin besar pula jaminan aktiva perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya.

$$b. \text{ Net Worth to Debt ratio} = \frac{\text{Total Aktiva} - \text{Total Hutang}}{\text{Total Hutang}} \times 100\%$$

Bila rasio ini semakin besar, maka kondisi perusahaan makin baik. Jika makin kecil berarti perusahaan makin cepat insolvel karena jumlah aktiva untuk menjamin hutang perusahaan makin kecil.

Ada 4 (empat) kemungkinan antara likuiditas dengan solvabilitas:

1. Perusahaan yang likuid tapi insolvel.

2. Perusahaan yang likuid dan solvabel.
3. Perusahaan yang solvabel tapi likuid.
4. Perusahaan yang insolvel dan likuid.

3. Rasio Rentabilitas

Rentabilitas adalah kemampuan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Penilaian rentabilitas ada beberapa cara: (Bambang Riyanto, 1995:36)

a. Rentabilitas Ekonomi (*Earning Power*)

Rentabilitas ekonomi adalah perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase.

Rasio ini mengukur kemampuan aktiva perusahaan untuk memperoleh laba dari operasi perusahaan (Suad Husnan, 1997:563).

Aktiva untuk mengukur kemampuan memperoleh laba operasi adalah aktiva operasional.

Rumus rentabilitas ekonomi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rentabilitas Ekonomi} = \frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Aktiva Operasional}} \times 100\%$$

Tinggi rendahnya rentabilitas ekonomi ini ditentukan oleh:

1) *Profit Margin*

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Laba bersih sebelum pajak}}{\text{Penjualan bersih}} \times 100\%$$

2) *Operating Assets Turnover*

$$\text{Operating Assets Turnover} = \frac{\text{Penjualan bersih}}{\text{Jumlah aktiva}} \times 1 \text{ kali}$$

b. Rentabilitas modal sendiri (rentabilitas usaha)

Rentabilitas modal sendiri merupakan kemampuan perusahaan dengan modal sendiri yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan keuntungan (Bambang Riyanto, 1996:36).

Rentabilitas usaha ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rentabilitas usaha} = \frac{\text{Laba setelah bunga dan pajak}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

C. Pengertian Sehat Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 198/KMK.016/1998

Analisa tingkat kesehatan finansial adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan pada saat tertentu. Penilaian prestasi perusahaan dilakukan dengan cara membandingkan ratio-ratio keuangan perusahaan (rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio rentabilitas dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 198/KMK.016/1998). Ada beberapa ketentuan menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI antara lain:

(1) Tingkat kesehatan BUMN digolongkan menjadi;

a. Sehat, yang terdiri dari :

AAA apabila total skor (TS) lebih besar dari 95

AA apabila $80 < TS \leq 95$

A apabila $65 < TS \leq 80$

b. Kurang Sehat, yang terdiri dari :

BBB apabila $50 < TS \leq 65$

BB apabila $40 < TS \leq 50$

B apabila $30 < TS \leq 40$

c. Tidak Sehat, yang terdiri dari :

CCC apabila $20 < TS \leq 30$

CC apabila $10 < TS \leq 20$

C apabila $TS \leq 10$

(2) Tingkat kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian :

a. Aspek Keuangan

b. Aspek Operasional

c. Aspek Administrasi

D. Analisa Tingkat Kesehatan Perusahaan

Analisa ini dilakukan dengan menggunakan 2 cara teknik analisa yaitu dengan analisa rasio keuangan dan analisa yang digunakan dengan membandingkan hasil perhitungan indikator-indikator penilaian, yaitu dengan cara membandingkan hasil perhitungan rasio keuangan perusahaan dengan kriteria kinerja BUMN menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 198/KMK.016/1998.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 198/KMK.016/1998, tingkat kesehatan keuangan perusahaan (BUMN) dapat digolongkan menjadi:

a. Sehat, yang terdiri dari :

AAA apabila total skor (TS) lebih besar dari 95

AA apabila $80 < TS \leq 95$

A apabila $65 < TS \leq 80$

b. Kurang Sehat, yang terdiri dari :

BBB apabila $50 < TS \leq 65$

BB apabila $40 < TS \leq 50$

B apabila $30 < TS \leq 40$

c. Tidak Sehat, yang terdiri dari :

CCC apabila $20 < TS \leq 30$

CC apabila $10 < TS \leq 20$

C apabila $TS \leq 10$

Tingkat kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi.

Dalam penilaian aspek keuangan, indikator yang dinilai serta bobot-bobotnya adalah sebagai berikut :

Indikator Infrastruktur	Bobot
1. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	15
2. Imbalan investasi (ROI)	10

3. Rasio kas	3
4. Rasio lancar	4
5. Collection Periods	4
6. Perputaran persediaan	4
7. Perputaran total asset	4
8. Rasio total modal sendiri terhadap total asset	6

Total keseluruhan indikator tersebut maksimal 50.

Adapun fungsi penilaian dari indikator-indikator tersebut untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan perusahaan, pada akhirnya merupakan salah satu pijakan dalam menilai perkembangan perusahaan tersebut, dalam hal ini BUMN.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu penelitian terhadap satu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus sehingga kesimpulan yang diambil berdasarkan penelitian hanya berlaku sebatas objek yang diteliti. Penelitian hanya pada satu objek (perusahaan) tertentu, dengan demikian hasil penelitian tidak dapat ditarik sebagai *generalisasi*. Dengan kata lain penelitian hanya dapat diterapkan untuk objek yang diteliti saja.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian : Penelitian dilaksanakan di PT Kereta Api (persero) DAOP VI Yogyakarta.
2. Waktu penelitian : Penelitian dilaksanakan bulan juli 2001 sampai bulan September 2001.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subyek penelitian : Kepala bagian akuntansi, Kepala bagian umum dan staf yang ditunjuk.
2. Obyek penelitian : Laporan keuangan PT Kereta Api (persero) DAOP IV Yogyakarta tahun 1997 – 2000.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

yaitu : mengadakan tanya jawab langsung dengan orang yang mengetahui tentang obyek penelitian atau yang terlibat langsung pada perusahaan.

2. Observasi

yaitu : mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung guna mendapatkan data yang diperlukan, dengan cara mencatat hal-hal yang diamati.

3. Dokumentasi

yaitu : mengumpulkan data dengan melihat catatan-catatan yang tersedia pada perusahaan yang ada hubungan dengan penelitian, antara lain catatan tentang sejarah perusahaan dan perkembangan perusahaan, catatan tentang struktur organisasi perusahaan, catatan tentang bagian-bagian yang ada pada perusahaan dan catatan pendukung lainnya.

E. Data yang diperlukan.

Data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah :

1. Gambaran umum perusahaan yang meliputi : sejarah perusahaan, struktur organisasi dan lain sebagainya.
2. Neraca perusahaan tahun 1997 sampai tahun 2000.
3. Laporan Laba Rugi perusahaan dari periode yang berakhir pada tahun 1997 sampai tahun 2000.



F. Teknik Analisa Data.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam teknik analisa data, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Analisa rasio laporan keuangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 198/KMK.016/1998.

a. Imbalan kepada pemegang saham (*Return On Equity (ROE)*)

Rumus :

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

b. Imbalan Investasi (*Return On Investment (ROI)*)

Rumus :

$$ROI = \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

c. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rumus :

$$\text{Cash ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Srt Berharga Jk pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

d. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rumus:

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

e. *Collection Periods (CP)*

Rumus:

$$CP = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 100\%$$

f. Perputaran Persediaan (PP)

Rumus :

$$PP = \frac{\text{Total persediaan}}{\text{Total pendapatan usaha}} \times 100\%$$

g. Perputaran Total Aset (*Total Asset Turn Over (TATO)*)

Rumus :

$$TATO = \frac{\text{Total pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

h. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset (TMS terhadap Total Aset)

Rumus :

$$\text{TMS thd TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2. Analisa Laporan Keuangan dalam menilai perkembangan perusahaan.

Analisa ini digunakan untuk mengetahui perkembangan keuangan perusahaan. Langkah-langkah analisis dilakukan dengan membandingkan hasil penilaian indikator-indikator tersebut diatas (ROE, ROI, , *Cash Ratio*, *Current Ratio* *Collection Periods*, Perputaran Persediaan, TATO, Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Aset).

Untuk mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan tersebut berikut ini adalah standar bobot penilaian kinerja perusahaan jika dilihat dari aspek keuangan:

a. Dengan menilai bobot dari jenis-jenis indikator kinerja perusahaan yang terdiri dari :

- Imbalan kepada pemegang saham (ROE), dengan maksimal bobotnya sebesar 15.
- Imbalan Investasi dengan maksimal bobotnya 10.
- Rasio Kas dengan maksimal bobotnya 3.
- Rasio Lancar dengan maksimal bobotnya 4.
- Collection Periods dengan maksimal bobotnya 4.
- Perputaran Persediaan dengan maksimal bobotnya 4
- Perputaran Total Asset dengan maksimal bobotnya 4.
- Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset dengan maksimal bobotnya 6.

Total keseluruhan indikator tersebut maksimal 50.

b. Setelah menjumlahkan seluruh bobot dari indikator-indikator tersebut maka dapatlah diketahui nilai kinerja perusahaan tersebut. Dalam hal ini terbatas pada aspek keuangan (*financial*) saja, atau dengan kata lain, penjumlahan dari indikator- indikator tersebut merupakan besarnya kinerja perusahaan yang dicerminkan dari perkembangan perusahaan itu sendiri.

Bab IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah singkat perusahaan

Sejarah singkat perkeretaapian di Indonesia dibagi menjadi tiga masa, yaitu masa Pemerintahan Hindia Belanda , masa pendudukan Jepang dan masa sesudah perang dunia II.

A.1 Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Dalam zaman kolonial Belanda tujuan perintah membangun lintasan kereta api adalah sebagai sarana untuk kebutuhan strategi masyarakat, menunjang ekonomi pemerintah kolonial Belanda dalam mengeksport hasil perkebunan. Pemerintah Belanda lebih memilih kereta api karena memiliki daya angkut yang relatif lebih besar.

Pada tanggal 17 Juni 1864 pembangunan jalan kereta api mulai dipasang dan baru dipergunakan secara operasional pada tanggal 17 Juni 1868 yaitu berupa lintas kereta api yang memanjang sejauh 26 Km antara Kemijen ke Tanggung (Jawa Tengah). Setelah itu bermunculan jalan-jalan kereta api dan usaha-usaha angkutan kereta yang dikelola dan dimiliki oleh perusahaan swasta sehingga jumlahnya menjadi 12 perusahaan perkeretaapian, yaitu :

1. N.P Nederland Indische Spoorweg Maatschappyy (N.I.S)
2. N.P Semarang – Cirebon Stomstam Maatschappyy (S.C.S)
3. N.P Semarang Joewono Stomstram Maatschappyy (S.J.S)
4. N.P Serajoe Dal Stoomtram Maatschappyy (S.D.S)

5. N.P Oost Java Stoomtram Maatschappyy (O.J.S)
6. N.P Kediri Stoomtram Maatschappyy (K.S.M)
7. N.P Mojokerto Stoomtram Maatschappyy (M.S.M)
8. N.P Malang Stoomtram Maatschappyy (M.S.M)
9. N.P Pasuruhan Stoomtram Maatschappyy (P.S.S.M)
10. N.P Probolinggo Stoomtram Maatschappyy (P.B.S.M)
11. N.P Madura Stoomtram Maatschappyy (Mad.S.M)
12. N.P Deli Stoomtram Maatschappyy (D.S.M)

Kemudian pada tanggal 18 Februari 1879 pembangunan jalan kereta api dilanjutkan dan dikembangkan ke Solo-Semarang-Yogyakarta. Selanjutnya pembangunan jaringan jalan kereta api tidak hanya dilakukan di Jawa tetapi juga di Sumatera dan Aceh bahkan Sulawesi dan Riau, yang kemudian dibongkar lagi dimasa pendudukan Jepang yang digunakan untuk pembangunan jalan rel di Burma.

A.2 Masa Pendudukan Jepang

Pada waktu pendudukan Jepang di Indonesia, jaringan perkereta apian dikuasai pemerintah Jepang yang ada di Jawa dengan nama Kukuyu Kyoku yang kemudian diubah menjadi Tedsudo Kyoku, yang kantor pusatnya berada di Bandung di bawah pemerintahan Angkatan Darat Jepang.

Pada zaman ini jaringan kereta api di Indonesia banyak yang dibongkar dan diangkut ke Burma dan Thailand sehingga keadaan perkeretaapian mengalami kemerosotan serta menuju kehancuran.

A.3 Masa Sesudah Perang Dunia II

Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tahun 1945, dan disusul proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka perusahaan kereta api negara dikuasai pemerintah Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 28 September 1945 lahirlah Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI). Untuk memudahkan cara bekerja dan pembangunan, maka diadakan penggabungan oleh pemerintah pendudukan Belanda antara perusahaan kereta api swasta dengan pemerintah yaitu dengan nama Kesatuan Perusahaan-perusahaan Kereta Api (Staats Spoor / Verecudge Spoorweeg Bedrij; S.S/V.S). Pada masa periode perang kemerdekaan antara tahun 1945 sampai dengan tahun 1949, pemerintah Indonesia dironggong dan didesak oleh tentara Belanda. Dengan situasi demikian maka kantor pusat (Balai Besar DKARI) di Bandung ditinggalkan setelah dibakar oleh pejuang dan kantor pusat selanjutnya berpindah dari Bandung ke Gombong, Yogyakarta, Jakarta, dan akhirnya pada bulan Oktober 1948 kantor pusat dipindahkan dari Jakarta ke Bandung yaitu di jalan Gereja nomor 1 (sekarang jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1 Bandung).

Kemudian pada tanggal 1 Januari 1950 dikeluarkan pengumuman pemerintah yang berisi gabungan Djawatan Kereta Api (DKA) menjadi satu jawatan dan dikukuhkan pada tanggal 6 Januari 1950. Semua kekayaan, hak, kewajiban tanggungan DKA. Kemudian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1963 status Djawatan Kereta Api diubah menjadi Perusahaan Negara Kereta api (PNKA), Tetapi tidak berlangsung lama karena tidak lama

kemudian ada peraturan nomor 5 tahun 1971 PNKA diubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), peraturan pemerintah no 61 tahun 1971, semua kekayaan, hak dan kewajiban beralih menjadi tanggungan PJKA. Mulai 1 Januari 1990 PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 1990. Pada tanggal 1 Juni 1999 PERUMKA berubah menjadi PT KERETA API (Persero) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1998.

B. Misi, Visi dan Budaya Perusahaan

B.1 Visi Perusahaan

Visi perusahaan adalah penyediaan jasa kereta api sebagai pilihan utama dengan :

- > Seluruh lapisan masyarakat adalah pelanggan
- > Berkembang dan terdepan dalam keselamatan dan keandalan
- > Pelopor dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan
- > Keuangan perusahaan sehat
- > Melalui semangat “TOP 21” yang merupakan “RAILWAY SPIRIT FOR STRATEGIC CHANGE” untuk mencapai visi perusahaan.

B.2 Misi Perusahaan.

Misi Perusahaan adalah :

1. Mewujudkan transportasi yang bersifat masal untuk pertumbuhan ekonomi serta menunjang pembangunan sektor lain dan pemerataan.
2. Mampu menghidupkan diri sendiri dan memupuk keuntungan.

B.3 Budaya Perusahaan.

Budaya perusahaan adalah pola-pola sikap, keyakinan, asumsi dan harapan yang dimiliki bersama dan dipegang secara mendalam untuk membentuk cara-cara bagaimana karyawan/karyawati bertindak dan berintegrasi agar sasaran perusahaan tercapai.

Budaya perusahaan yaitu “RELA” yang berarti ikhlas bekerja, berjuang, berkorban dan belajar untuk kemajuan perusahaan yang dijabarkan sebagai berikut :

R = Ramah

E = Efisien

L = Lancar

A = Aman

Budaya perusahaan merupakan komponen kunci keberhasilan dari pencapaian misi, arah usaha, strategi serta efektifitas perusahaan.

C. Strategi Perusahaan dan Sasaran Strategi Perusahaan

C.1 Strategi Perusahaan

Strategi perusahaan adalah :

- * Strategi Pemantapan : hakekatnya merupakan strategi penetrasi pasar untuk produk yang ada.

- * Strategi Peningkatan : hakekatnya merupakan strategi peningkatan pasar untuk produk yang ada di pasar yang sama.
- * Strategi Pengembangan : hakekatnya merupakan strategi pengembangan produk baru dan pasar baru.

C.2 Sasaran Strategi Perusahaan

Sasaran strategi perusahaan adalah sasaran strategis kebijaksanaan yang meliputi 5 (lima) peningkatan dan 5(lima) sukses yaitu :

- 5 (lima) peningkatan
 1. Peningkatan citra perusahaan dengan peningkatan pelayanan melalui :
 - > Ketetapan waktu dan keselamatan perjalanan kereta api.
 - > Kenyamanan dan kebersihan baik di stasiun maupun dalam kereta api.
 - > Tanggap demi kepuasan pelanggan.
 2. Peningkatan keandalan dan ketersediaan prasarana dan sarana melalui efektifitas dan efisiensi perawatan.
 3. Peningkatan pangsa angkutan barang dengan percepatan pertumbuhan volume angkutan barang.
 4. Peningkatan produktifitas asset.

5. Peningkatan kesejahteraan karyawan secara bertahap sesuai kemampuan perusahaan.
- 5 (lima) sukses
1. Menyukseskan pengembangan kinerja dengan pendapatan profesionalisme.
 2. Menyukseskan modernisasi peralatan perkeretaapian melalui penerapan teknologi yang lebih tinggi.
 3. Menyukseskan pengembangan kualitas sumber daya manusia.
 4. Menyukseskan angkutan penting.
 5. Menyukseskan pengoperasian kereta api unggulan (produk baru).

D. Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan.

D.1 Tugas pokok PT KERETA API (Persero)

Tugas pokok PT Kereta Api (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8 tahun 1991 adalah menyelenggarakan perusahaan pelayanan jasa kereta api dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang dan barang secara massal untuk menunjang pembangunan nasional.

D.2 Fungsi PT KERETA API (Persero)

Fungsi PT Kereta Api (Persero) adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tata administrasi, personalia, keuangan dan umum.
- 2) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan rehabilitasi jalan dan bangunan.
- 3) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi sinyal dan telekomunikasi.
- 4) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan operasi dan pengamanan operasi.
- 5) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian traksi.
- 6) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengawasan.
- 7) Mengawasi dan mengendalikan unit pelaksana teknis.

E. Struktur Organisasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata kerja Perum Kereta Api Tingkat Pusat Bab I pasal I disebutkan bahwa kedudukan PERUMKA adalah sebagai BUMN dalam lingkungan Departemen Perhubungan, dipimpin oleh suatu Direksi dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Dalam keputusan diatur mengenai organisasi PERUMKA yang tersusun dalam tiga tingkat :

- a. Tingkat Pusat yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan tugas pokok dan pembinaan manajerial.
- b. Tingkat Daerah Operasi yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis operasional.
- c. Tingkat Unit Pelaksanaan Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan langsung operasional dan pelayanan jasa angkutan kereta api maupun kegiatan-kegiatan penunjang operasi lainnya.

PT Kereta Api (Persero) dalam pengelolaannya dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang bertanggung jawab terhadap terselenggaranya kelancaran pengelolaan kereta api dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama dibantu oleh beberapa direktur, kepala satuan lainnya, kepala daerah operasi beserta jajarannya. Secara vertikal dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Direktur Keuangan
2. Direktur Teknis
3. Direktur Operasional dan Pemasaran
4. Direktur Personalia dan umum
5. Direktur Pengembang Usaha
6. Kepala Pusat Pendidikan dan latihan
7. Kepala Satuan Pengawas Interen
8. Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan

9. Kepala Pusat Logistik

10. Kepala Daerah Operasi

Bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional kereta api di wilayah operasinya masing-masing di Jawa. Pengelolaan perkeretaapian di Jawa terbagi atas beberapa Daerah Operasi (Daop), yaitu :

1. Daerah operasi I Jakarta
2. Daerah Operasi II Bandung
3. Daerah Operasi III Cirebon
4. Daerah Operasi IV Semarang
5. Daerah Operasi V Purwokerto
6. Daerah Operasi VI Yogyakarta
7. Daerah Operasi VII Madiun
8. Daerah Operasi VIII Surabaya
9. Daerah Operasi IX Jember
10. Daerah Operasi Jabotabek

11. Kelapa Eksploitasi (KE)

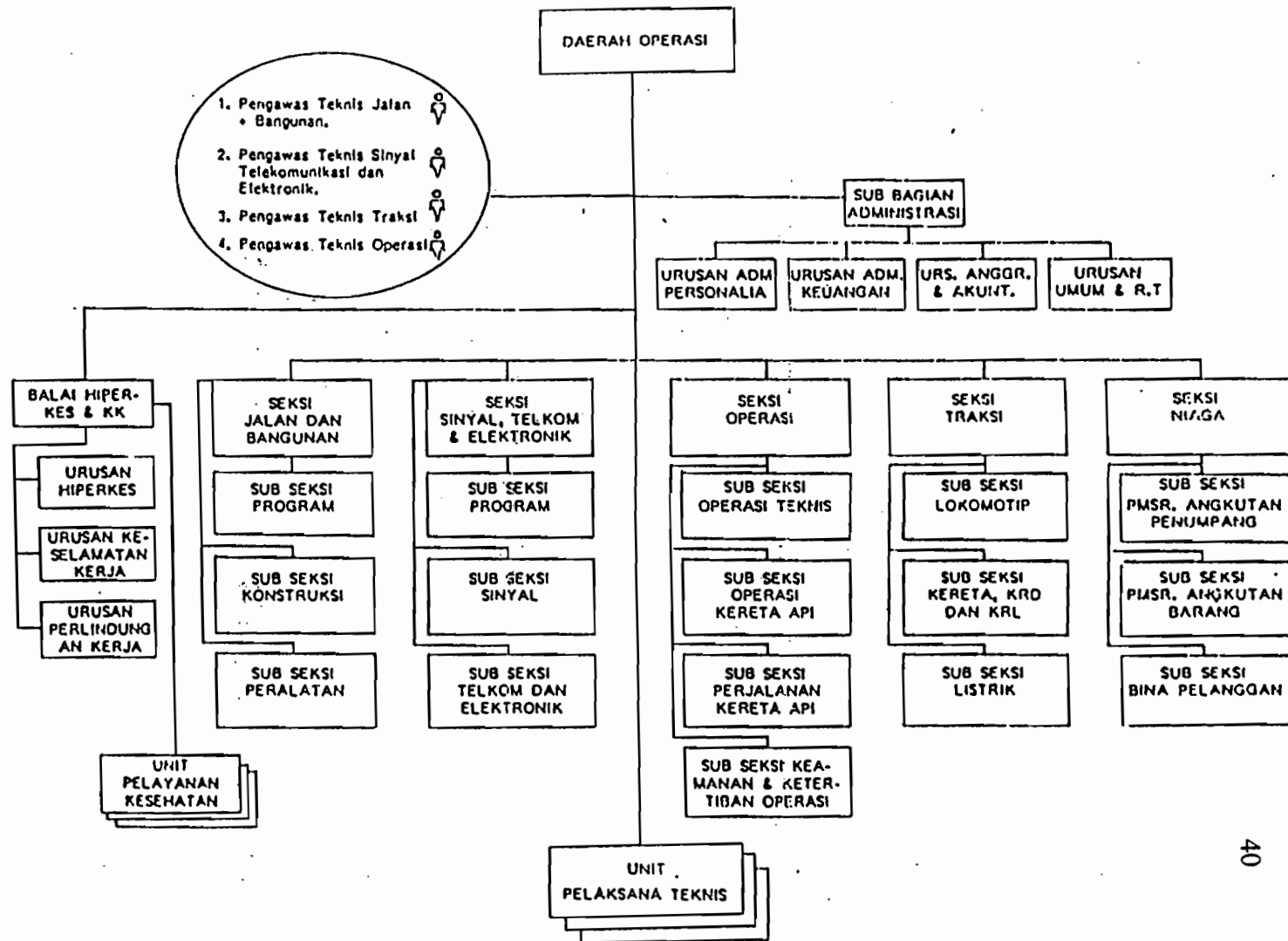
Bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional kereta api di wilayah eksploitasi masing-masing di Sumatera yaitu :

- a. Eksploitasi Sumatera Utara
- b. Eksploitasi Sumatera Barat
- c. Eksploitasi Sumatera selatan

Disetiap Daerah Operasi di Jawa dan Wilayah Eksploatasi di Sumatera dalam membantu kelancaran tugasnya, Kepala Daerah Operasi dan Kepala Eksploatasi dibantu oleh Kasubbag, beberapa Kepala Seksi, Kepala Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja dan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) yaitu :

1. Dinas Administrasi yang mempunyai tugas melaksanakan administasi personalia, administrasi keuangan, administrasi anggaran dan akuntansi serta administrasi umum dan kerumahtanggaan.
2. Dinas Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengujian dan pengawasan di bidang higiene perusahaan, kesehatan kerja dan keselamatan kerja.
3. Dinas Jalan, Rel dan Jembatan yang mempunyai tugas mengkoordinasi, mengatur dan menyusun rencana program pemeliharaan jalan kereta api, sepur simpang, bangunan, jembatan dan rumah dinas serta mengevaluasi hasil pendayagunaannya.
4. Dinas Sinyal Telekomunikasi dan Listrik Umum yang mempunyai tugas menyusun rencana dan program pemeliharaan peralatan sinyal, telekomunikasi, elektronika dan listrik serta melakukan evaluasi pemanfaatannya.

5. Dinas Traksi yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, penyediaan sarana operasi, kesiapan operasi serta mengendalikan perbaikan dan perawatan.
6. Dinas Operasi dan Niaga yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan pengendalian kinerja angkutan penumpang, barang serta pengamanan angkutan barang dan penumpang serta melaksanakan program pemasaran angkutan penumpang dan barang.
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu unit organisasi atau unit kerja yang melakukan kegiatan langsung untuk tercapainya sebagian tugas pokok PT Kereta Api di bidang tertentu.



BAB V

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Data utama yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah data yang berasal dari laporan keuangan perusahaan dan laporan-laporan pendukung lainnya. Penelitian ini akan mengetahui kondisi keuangan perusahaan atau menilai tingkat kesehatan perusahaan yang dilihat dari aspek keuangannya saja selama empat periode akuntansi atau empat tahun terakhir yang meliputi laporan keuangan tahun 1997 sampai dengan tahun 2000.

Data keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan tahun 1997 sampai dengan tahun 2000, yang terdiri dari :

- Neraca per 31 Desember 1997, 1998, 1999, 2000.
- Laporan Laba Rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 1997, 1998, 1999, 2000.

B. Analisa Data

Untuk menjawab permasalahan, maka berikut ini dilakukan analisa data yang diperoleh dari hasil penelitian, dimana penelitian ini untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan perkembangan perusahaan yang dilihat dari aspek keuangannya saja.

Hasil analisa rasio terhadap laporan keuangan perusahaan PT KERETA API INDONESIA (persero) dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 adalah sebagai berikut :

1. Analisa rasio laporan keuangan menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan no. 198/KMK.016/1998.

Analisa ini dilakukan dengan cara membandingkan pos-pos dalam Neraca dan Laporan Laba Rugi baik secara maupun kombinasi dari kedua laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan no.198/KMK.016/1998 ini berguna untuk mengetahui atau menilai tingkat kesehatan perusahaan (BUMN), masing-masing indikator yang dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

- a. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)
- b. Imbalan Investasi (ROI)
- c. Rasio Kas (*Cash Ratio*)
- d. Rasio Lancar
- e. Perputaran piutang (*Collection Period*)
- f. Perputaran Persediaan
- g. Perputaran Total Asset
- h. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aktiva

Secara khusus pembahasan metode penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE)

Rumus :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$$

Definisi :

- Laba setelah pajak adalah laba bersih dikurangi dengan laba hasil penjualan dari aktiva tetap, aktiva non produksi, aktiva lain-lain dan saham penyertaan langsung.
- Modal sendiri adalah seluruh komponen modal sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen modal sendiri yang digunakan untuk membiayai aktiva tetap dalam pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Dalam modal sendiri tersebut termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya.
- Aktiva Tetap dalam pelaksanaan adalah posisi pada akhir tahun buku Aktiva Tetap yang sedang dalam tahap pembangunan.

Tabel V.1

Perhitungan tingkat Imbalan Pemegang Saham

Thn	Modal Sendiri	Laba setelah pajak
1997	125.129.801.766	(23.785.589.656)
1998	144.755.757.137	(6.766.669.521)
1999	154.680.390.106	(3.996.214.130)
2000	159.163.023.191	17.458.152.894

Laba setelah pajak untuk tahun 2000 adalah :

Laba pada tahun 2000	:	24.915.218.417
Pajak	10% x 50.000.000 =	5.000.000
	15% x 50.000.000 =	7.500.000
	30% x 24.815.218.417 =	<u>7.444.565.523</u>
		<u>7.457.065.523</u>
Laba setelah pajak		17.458.152.894

maka besarnya ROE untuk :

$$\begin{aligned} \text{Th 1997} &= \frac{(23.785.589.656)}{125.129.801.766} \times 100\% \\ &= -19,01\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Th 1998} &= \frac{(6.766.669.521)}{144.755.757.137} \times 100\% \\ &= -4,67\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Th 1999} &= \frac{(3.996.214.130)}{154.680.390.106} \times 100\% \\ &= -2,58\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Th 2000} &= \frac{17.458.152.894}{159.163.023.191} \times 100\% \\ &= 10,97\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat perubahan-perubahan tingkat Imbalan pada pemegang saham selama empat tahun terakhir. Tingkat imbalan kepada pemegang saham tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 mengalami kenaikan atau peningkatan.

b. Imbalan Investasi (ROI)

Rumus :

$$\text{ROI} = \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Capital employed}} \times 100\%$$

Definisi :

- EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan dari aktiva tetap, aktiva lain-lain, aktiva non produksi dan saham penyertaan langsung.
- Penyusutan adalah Depresiasi, amortisasi dan Depleksi.
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total aktiva dikurangi aktiva tetap dalam pelaksanaan.

Tabel V.2

Perhitungan tingkat Imbalan Investasi

Thn	EBIT	Penyusutan	Capital Employed
1997	(23.785.589.656)	3.389.407.390	129.807.621.375
1998	(6.766.669.521)	3.421.854.089	145.920.836.834
1999	(3.996.214.130)	3.515.591.604	156.912.629.085
2000	24.915.218.417	5.622.939.224	161.777.016.794

maka besarnya ROI untuk :

$$\begin{aligned} \text{Thn 1997} &= \frac{(23.785.589.656) + 3.389.407.390}{129.807.621.375} \times 100\% \\ &= -15,71\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Thn 1998} &= \frac{(6.766.669.521) + 3.421.854.089}{145.920.836.834} \times 100\% \\ &= -2,29\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Thn 1999} &= \frac{(3.996.214.130) + 3.515.591.604}{156.912.629.085} \times 100\% \\ &= -0,31\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Thn 2000} &= \frac{24.915.218.417 + 5.622.939.224}{161.777.016.794} \times 100\% \\ &= 18,88\% \end{aligned}$$

Dari penilaian diatas dapat dilihat perubahan-perubahan tingkat imbalan investasi selama empat tahun terakhir. Imbalan investasi tahun 1997 sampai tahun 2000 mengalami peningkatan.

C. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rumus :

$$\text{Rasio kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Surat berharga jk pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Definisi :

- Kas, bank dan Surat berharga jangka pendek adalah posisi masing-masing pada akhir tahun buku.
- Current Liabilities adalah posisi seluruh kewajiban lancar pada akhir tahun buku.

Tabel V.3
Perhitungan Tingkat Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Thn	Kas dan Bank	Surat berharga jk pendek	Current Liabilities
1997	4.279.410.320	---	5.984.376.246
1998	6.289.422.265	---	8.789.506.666
1999	4.608.257.444	---	11.231.338.420
2000	8.369.080.115	---	12.911.213.375

maka besarnya Rasio Kas untuk :

$$\begin{aligned} \text{Thn 1997} &= \frac{4.279.410.320}{5.984.376.246} \times 100\% \\ &= 71,51\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Thn 1998} &= \frac{6.289.422.265}{8.789.506.666} \times 100\% \\ &= 71,56\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Thn 1999} &= \frac{4.608.257.444}{11.231.338.420} \times 100\% \\ &= 41,03\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Thn 2000} &= \frac{8.368.080.115}{12.911.213.375} \times 100\% \\ &= 64,82\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat perubahan-perubahan tingkat rasio kas selama empat tahun terakhir. Tingkat rasio kas tahun 1998 -1999 mengalami penurunan, walaupun pada tahun sebelumnya, 1997 - 1998 mengalami peningkatan. Tingkat rasio kas tahun 1999 - 2000 mengalami peningkatan.

D. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rumus :

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Definisi :

- *Current asset* adalah posisi total aktiva lancar pada akhir tahun buku.
- *Current Liabilities* adalah posisi total kewajiban lancar pada akhir tahun buku.

Tabel V.4

Daftar Perhitungan Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Thn	Current Asset	Current Liabilities
1997	29.851.595.714	5.984.376.246
1998	36.819.009.196	8.789.506.666
1999	57.461.730.409	11.231.338.420
2000	66.775.030.679	12.911.213.375

maka besarnya Rasio Lancar untuk :

$$\begin{aligned}\text{Thn 1997} &= \frac{29.851.595.714}{5.984.376.246} \times 100\% \\ &= 498,83\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Thn 1998} &= \frac{36.819.009.196}{8.789.506.666} \times 100\% \\ &= 418,89\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Thn 1999} &= \frac{57.461.730.409}{11.231.338.420} \times 100\% \\ &= 511,62\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Thn 2000} &= \frac{66.775.030.679}{12.911.213.375} \times 100\% \\ &= 517,19\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat perubahan-perubahan tingkat rasio lancar atau tingkat Likuiditasnya selama empat tahun terakhir. Rasio lancar tahun 1997 – 1998 mengalami penurunan sedangkan tahun 1998 – 2000 mengalami peningkatan.

E. Perputaran Piutang (*Collection Periods*)

Rumus :

$$\text{Collection Periods} = \frac{\text{Total piutang usaha}}{\text{Total pendapatan usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Definisi :

- Total Piutang Usaha adalah posisi piutang usaha setelah dikurangi cadangan penyisihan piutang pada akhir tahun buku.
- Total Pendapatan Usaha adalah jumlah pendapatan usaha selama tahun buku.

Tabel V.5

Daftar Tingkat Perputaran Piutang

Tahun	Total piutang usaha	Total pendapatan usaha
1997	1.481.482.462	49.341.016.575
1998	2.399.264.507	71.489.905.420
1999	3.828.640.101	61.722.952.753
2000	3.334.433.768	120.619.009.043

maka besarnya Perputaran Piutang untuk :

$$\begin{aligned} \text{Thn 1997} &= \frac{1.481.482.462}{49.341.016.575} \times 365 \text{ hari} \\ &= 10,9 \text{ atau } 11 \text{ hari} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Thn 1998} &= \frac{2.399.264.507}{71.489.905.420} \times 365 \text{ hari} \\ &= 12,25 \text{ atau } 12 \text{ hari} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Thn 1999} &= \frac{3.828.640.101}{61.722.952.753} \times 365 \text{ hari} \\ &= 22,64 \text{ atau } 23 \text{ hari} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Thn 2000} &= \frac{3.334.433.768}{120.619.009.043} \times 365 \text{ hari} \\ &= 10,09 \text{ atau } 10 \text{ hari} \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas dapat dilihat perubahan-perubahan tingkat perubahan piutang selama empat tahun terakhir. Perputaran piutang tahun 1997 – 1999 semakin lambat, pada tahun 1999 – 2000 perputaran piutang semakin cepat.

F. Perputaran Persediaan

Rumus :



$$\text{Perputaran persediaan} = \frac{\text{Total persediaan}}{\text{Total pendapatan usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Definisi :

- Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang.
- Total Pendapatan Usaha adalah jumlah pendapatan usaha selama tahun buku.

Tabel V.6

Daftar Tingkat Perputaran Persediaan

Tahun	Total persediaan	Total pendapatan usaha
1997	20.564.636.255	49.341.016.575
1998	22.613.595.583	71.489.905.420
1999	46.298.931.197	61.722.952.753
2000	54.068.070.754	120.619.009.043

maka besarnya Perputaran Persediaan untuk :

$$\begin{aligned}\text{Thn 1997} &= \frac{20.564.636.255}{49.341.016.575} \times 365 \text{ hari} \\ &= 152,13 \text{ atau } 152 \text{ hari}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Thn 1998} &= \frac{22.613.595.583}{71.489.905.420} \times 365 \text{ hari} \\ &= 115,46 \text{ atau } 115 \text{ hari}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Thn 1999} &= \frac{46.298.931.197}{61.722.952.753} \times 365 \text{ hari} \\ &= 273,79 \text{ atau } 274 \text{ hari}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Thn 2000} &= \frac{54.068.070.754}{120.619.009.043} \times 365 \text{ hari} \\ &= 163,61 \text{ atau } 164 \text{ hari}\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat perubahan-perubahan tingkat perputaran piutang selama empat tahun terakhir. Perputaran piutang tahun 1997 – 1998 semakin cepat, tahun 1998 – 1999 semakin lambat, tahun 1999 – 2000 semakin cepat.

G. Perputaran Total Asset (*Total Asset Turnover*)

Rumus :

$$\text{Perputaran total asset} = \frac{\text{Total pendapatan}}{\text{Capital employed}} \times 100\%$$

Definisi :

- Total Pendapatan adalah total pendapatan usaha dan non usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan aktiva tetap.
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total aktiva dikurangi aktiva tetap dalam pelaksanaan.

Tabel V.7

Daftar Perputaran Total Asset (*Total Asset Turnover*)

Tahun	Total pendapatan	Capital employed
1997	50.489.179.674	129.807.621.375
1998	74.616.841.195	145.920.836.834
1999	63.172.059.633	156.912.629.085
2000	123.912.685.140	161.777.016.794

maka besarnya perputaran total asset untuk :

$$\begin{aligned} \text{Thn 1997} &= \frac{50.489.179.674}{129.807.621.375} \times 100\% \\ &= 0,38895 \text{ kali atau } 38,89\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Thn 1998} &= \frac{74.616.841.195}{145.920.836.834} \times 100\% \\ &= 0,51135 \text{ kali atau } 51,14\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Thn 1999} &= \frac{63.172.059.633}{156.912.629.085} \times 100\% \\ &= 0,40259 \text{ kali atau } 40,26\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Thn 2000} &= \frac{123.912.685.140}{161.777.016.794} \times 100\% \\ &= 0,76594 \text{ kali atau } 76,59\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat perubahan-perubahan perputaran total asset selama empat tahun terakhir. Perputaran total aset tahun 1997 – 1998 semakin cepat, tahun 1998 – 1999 semakin lambat, tahun 1999 – 2000 semakin cepat.

H. Rasio Total Modal Sendiri

Rumus :

$$\text{Rasio total modal sendiri thd total asset} = \frac{\text{Total modal sendiri}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

Definisi :

- Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen modal sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.
- Total Asset adalah total asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada posisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel V.8

Daftar Tingkat Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Tahun	Total modal sendiri	Total Asset
1997	125.129.801.766	129.807.621.375
1998	144.755.757.137	145.920.836.834
1999	154.680.390.106	157.278.075.335
2000	159.163.023.191	161.777.016.794

Maka besarnya total modal sendiri terhadap total asset untuk :

$$\begin{aligned}\text{Thn 1997} &= \frac{125.129.801.766}{129.807.621.375} \times 100\% \\ &= 96,39\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Thn 1998} &= \frac{144.755.757.137}{145.920.836.834} \times 100\% \\ &= 99,20\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Thn 1999} &= \frac{154.680.390.106}{157.278.075.335} \times 100\% \\ &= 98,35\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Thn 2000} &= \frac{159.163.023.191}{161.777.016.794} \times 100\% \\ &= 98,38\%\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat perubahan-perubahan rasio total modal terhadap total asset selama empat tahun terakhir. Rasio total modal sendiri terhadap total asset tahun 1997 – 1998 mengalami peningkatan, tahun 1998 – 1999 mengalami penurunan, 1999 - 2000 mengalami peningkatan.

2. Penilaian kinerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI no.198/KMK.016/1998 yang diukur melalui tingkat kesehatan keuangan (*financial*) perusahaan.

Dalam menilai perkembangan perusahaan ini, yang menjadi acuan adalah tingkat kesehatan perusahaan. Pertama menentukan besar nilai atau bobot dari masing-masing indikator, barulah dapat disesuaikan dengan bobot yang menjadi standar acuan yang ada dalam Surat Ketetapan Menteri no.198/KMK.016/1998. Dalam surat ketetapan tersebut standar maksimal untuk masing-masing bobot dalam indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- Imbalan kepada pemegang saham (ROE), mempunyai bobot maksimal sebesar 15.
- Imbalan investasi (ROI), mempunyai bobot maksimal sebesar 10.
- Rasio kas (*Cash Ratio*), mempunyai bobot maksimal sebesar 3.
- Rasio lancar (*Current Ratio*), mempunyai bobot maksimal sebesar 4.
- Collection periods, mempunyai bobot maksimal sebesar 4.
- Perputaran persediaan, mempunyai bobot maksimal sebesar 4.
- Perputaran total asset (TATO), mempunyai bobot maksimal sebesar 4.
- Rasio total modal sendiri terhadap total asset, mempunyai bobot maksimal sebesar 6.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)
 - tahun 1997 diperoleh hasil sebesar – 19,01% berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 1.
 - tahun 1998 diperoleh hasil sebesar –4,67% berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 1.
 - tahun 1999 diperoleh hasil sebesar –2,58% berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 1.
 - tahun 2000 diperoleh hasil sebesar 10,97% berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 10,5.

b. Imbalan Investasi (ROI)

- tahun 1997 diperoleh hasil sebesar – 15,71% ,berdasarkan daftar skor menurut SK Menter Keuangan sebesar 0.
- tahun 1998 diperoleh hasil sebesar –2,29%,berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 0.
- tahun 1999 diperoleh hasil sebesar – 0,31%, berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 0.
- tahun 2000 diperoleh hasil sebesar 18,88%, berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 10.

c. Rasio kas (*Cash Ratio*)

- tahun 1997 diperoleh hasil sebesar 71,51%, berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 3.
- tahun 1998 diperoleh hasil sebesar 71,56%, berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri keuangan sebesar 3.
- tahun 1999 diperoleh hasil sebesar 41,03%, berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 3.
- tahun 2000 diperolaeh hasil sebesar 64,82%, berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 3.

d. Rasio lancar (*Current Ratio*)

- tahun 1997 diperoleh hasil sebesar 498,83%, berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 3.
- tahun 1998 diperoleh hasil sebesar 418,89%, berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 3.

- tahun 1999 diperoleh hasil sebesar 511,62%, berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 3.
- tahun 2000 diperoleh hasil sebesar 517,19%, berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 3.

e. *Collection Periods*

- tahun 1997 diperoleh hasil sebesar 11 hari, berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 4.
- tahun 1998 diperoleh hasil sebesar 12 hari, berdasarkan daftar skor menurut Sk Menteri Keuangan sebesar 4.
- tahun 1999 diperoleh hasil sebesar 23 hari, berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 4.
- tahun 2000 diperoleh hasil sebesar 10 hari, berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 4.

f. Perputaran persediaan

- tahun 1997 diperoleh hasil sebesar 152 hari, berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 2.
- tahun 1998 diperoleh hasil sebesar 115 hari, berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 4.
- tahun 1999 diperoleh hasil sebesar 273 hari, berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 0,4.
- tahun 2000 diperoleh hasil sebesar 163 hari, berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri keuangan sebesar 4.

g. Perputaran total aset (TATO)

- tahun 1997 diperoleh hasil sebesar 38,89%, berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 1.
 - tahun 1998 diperoleh hasil sebesar 51,14%, berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 3.
 - tahun 1999 diperoleh hasil sebesar 40,26%, berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 3.
 - tahun 2000 diperoleh hasil sebesar 76,59%, berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 4.
- h. Rasio total modal sendiri terhadap total aset.
- tahun 1997 diperoleh hasil sebesar 96,39%, berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 3,5.
 - tahun 1998 diperoleh hasil sebesar 99,20%, berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 3,5.
 - tahun 1999 diperoleh hasil sebesar 98,35%, berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 3,5.
 - tahun 2000 diperoleh hasil sebesar 98,38%, berdasarkan daftar skor menurut SK Menteri Keuangan sebesar 3,5.

Secara rinci kinerja dari PT Kereta Api (Persero), DAOP VI wilayah Yogyakarta adalah seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Indikator	Th 1997	Th 1998	Th 1999	Th 2000
a. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	1	1	1	10,5
b. Imbalan investasi (ROI)	0	0	0	10
c. Rasio kas	3	3	3	3
d. Rasio lancar	3	3	3	3
e. Collection periods	4	4	4	4
f. Perputaran persediaan	2	4	0,4	4
g. Perputaran total asset	1	3	3	4
h. Rasio modal sendiri terhadap total asset	3,5	3,5	3,5	3,5
Total	17,5	21,5	17,9	42

C. Pembahasan

Untuk menjawab permasalahan, maka berikut ini merupakan pembahasan yang diperoleh dari hasil analisis data :

1. Analisis rasio laporan keuangan menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan no.198/KMK.016/1998
 - a. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)

Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat perubahan-perubahan tingkat imbalan kepada pemegang saham selama empat tahun terakhir. Tingkat imbalan kepada pemegang saham tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 mengalami peningkatan. Pada tahun 1997 diketahui besarnya tingkat imbalan kepada pemegang saham sebesar – 19,41%. Hal ini menunjukkan bahwa modal sendiri belum mampu

menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa, karena pada tahun ini perusahaan mengalami kerugian. Begitu juga pada tahun 1998 sebesar $-4,67\%$ dan tahun 1999 sebesar $-2,58\%$. Pada tahun 2000, besarnya tingkat imbalan kepada pemegang saham meningkat sebesar $10,97\%$. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa adalah sebesar $10,97\%$. Ini berarti bahwa setiap rupiah modal sendiri menghasilkan keuntungan netto Rp 0,109 yang tersedia bagi pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa.

b. Imbalan investasi (ROI)

Pada tahun 1997 tingkat imbalan investasi (ROI) sebesar $-15,71\%$. Hal ini berarti belum adanya kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan.

Pada tahun 1998 tingkat imbalan investasi meningkat menjadi $-2,29\%$. Kenaikan ini besar dipengaruhi oleh kenaikan EBIT, penyusutan dan *Capital Employed* yang relatif meningkat.

Pada tahun 1999 tingkat imbalan investasi menurun menjadi – 0,31%. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan EBIT dan penyusutan serta *Capital Employed* yang relatif meningkat.

Pada tahun 2000 tingkat imbalan investasi meningkat menjadi 18.88%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan EBIT, penyusutan dan *Capital Employed* yang relatif meningkat.

c. Rasio kas (*Cash Ratio*)

Pada tahun 1997 tingkat rasio kas sebesar 71,51%. Hal ini berarti bahwa kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang segera dapat diuangkan sebesar 71,51% atau setiap hutang lancar sebesar Rp 1,00 dapat dijamin oleh kas dan efek sebesar Rp 0,7151.

Pada tahun 1998 tingkat rasio kas sebesar 71,56%. Dalam tahun ini terjadi peningkatan rasio sebesar 0,00069% dari tahun 1997. Hal ini berarti kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang segera dapat diuangkan sebesar 71,56% atau setiap hutang lancar sebesar Rp 1,00 dapat dijamin oleh kas dan efek sebesar Rp 0,7156.

Pada tahun 1999 tingkat rasio kas sebesar 41,03%. Dalam tahun ini terjadi penurunan sebesar 0,4%. Hal ini berarti kemampuan untuk membayar hutang yang harus segera dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan dan efek yang segera dapat

diuangkan sebesar 41,03% atau setiap hutang lancar sebesar Rp 1,00 dapat dijamin oleh kas dan efek sebesar Rp 0,4103.

Pada tahun 2000 tingkat rasio kas sebesar 64,82%. Dalam tahun ini terjadi peningkatan sebesar 0,58%. Hal ini berarti kemampuan untuk membayar hutang yang harus segera dipenuhi dengan kas yang tersedia di perusahaan dan efek yang segera dapat diuangkan sebesar 64,82% atau setiap hutang lancar sebesar Rp1,00 dapat dijamin oleh kas dan efek sebesar Rp 0,6482.

d. Rasio lancar (*Current Ratio*)

Pada tahun 1997, rasio lancar sebesar 498,83%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap hutang lancar perusahaan sebesar Rp 1,00 dijamin dengan aktiva lancar perusahaan sebesar Rp 4,9883. Dengan demikian perusahaan mengalami likuid karena mampu melunasi semua hutang lancarnya dengan aktiva yang ada.

Pada tahun 1998, rasio lancar sebesar 418,89%. Dalam tahun ini mengalami penurunan sebesar 0,16% dari tahun 1997. Hal ini menunjukkan bahwa setiap hutang lancar perusahaan sebesar Rp 1,00 dijamin dengan aktiva lancar perusahaan sebesar Rp 4,1889. Dengan demikian perusahaan mengalami likuid karena mampu melunasi semua hutang lancarnya dengan aktiva yang ada.

Pada tahun 1999, rasio lancar sebesar 511,62%. Dalam tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0,22% dari tahun 1998. Hal ini menunjukkan bahwa setiap hutang lancar sebesar Rp 1,00 dijamin

dengan aktiva lancar sebesar Rp 5,1162. Dengan demikian perusahaan mengalami likud karena mampu melunasi semua hutang lancarnya dengan aktiva yang ada.

Pada tahun 2000, rasio lancar sebesar 517,19%. Dalam tahun ini mengalami kenaikan sebesar 0,01% dari tahun 1999. Hal ini menunjukkan bahwa setiap hutang lancar sebesar Rp 1,00 dijamin dengan aktiva lancar sebesar Rp 5,1719. Dengan demikian perusahaan mengalami likuid karena mampu melunasi semua hutang lancarnya dengan aktiva yang ada.

e. Perputaran piutang (*Collection Periods*)

Pada tahun 1997 perputaran piutang selama 11 hari. Hal ini berarti periode yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan piutang setiap 11 hari.

Pada tahun 1998 perputaran piutang selama 12 hari, sedangkan pada tahun 1999 perputaran piutang sebesar 23 hari. Dalam tahun ini perputaran piutang semakin lambat sebesar 0,9% dari tahun 1998.

Pada tahun 2000 perputaran piutang selama 10 hari. Dalam tahun ini perputaran piutang semakin cepat sebesar 0,6 % dari tahun 1999. Hal ini berarti periode yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan piutang adalah setiap 10 hari sekali.

f. Perputaran persediaan

Pada tahun 1997 perputaran persediaan selama 152 hari. Hal ini berarti pada tahun 1997 waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengolah persediaan hingga produk laku untuk di jual atau diakui sebagai pendapatan selama 152 hari.

Pada tahun 1998 perputaran persediaan selama 115 hari, tahun 1999 selama 274 hari, tahun 2000 selama 164 hari.

Pada PT Kereta Api (Persero), perputaran persediaan tidak berpengaruh terhadap pendapatan karena perusahaan ini bergerak dibidang jasa angkutan.

g. Perputaran total aset

Pada tahun 1997 perputaran total aset sebesar 0,38895 kali atau 38,89%. Hal ini berarti kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva berputar dalam tahun 1997 atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan *revenue* adalah 0,38895 kali atau 38,89%. Dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva rata-rata dalam tahun 1997 berputar 0,38895 kali atau setiap rupiah aktiva selama setahun dapat menghasilkan revenue sebesar Rp 0,38.

Pada tahun 1998 perputaran total aset sebesar 0,51135 kali atau 51,14%. Dalam tahun ini mengalami peningkatan sebesar 0,12240 atau 0,31% dari tahun 1997. Hal ini berarti kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva rata-rata dalam tahun 1998

berputar sebanyak 0,51135 kali atau setiap rupiah aktiva selama setahun dapat menghasilkan revenue sebesar Rp 0,51.

Pada tahun 1999 perputaran total aset sebesar 0,40259 kali atau 40,26%. Dalam tahun ini mengalami penurunan sebesar 0,10876. Hal ini berarti kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva rata-rata dalam tahun 1999 berputar sebanyak 0,40259 kali atau setiap rupiah aktiva selama setahun dapat menghasilkan revenue sebesar Rp 0,40.

Pada tahun 2000 perputaran total aset sebesar 0,76594 atau 76,59%. Dalam tahun ini terjadi peningkatan sebesar 0,36335. Hal ini berarti kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva rata-rata dalam tahun 2000 berputar sebanyak 0,76594 kali atau setiap rupiah aktiva dalam setahun dapat menghasilkan revenue sebesar Rp 0,76.

h. Rasio modal sendiri terhadap total aset

Pada tahun 1997 rasio modal sendiri terhadap total aset sebesar 96,39%. Ini berarti dari total aset yang ada di perusahaan 96,39%nya merupakan modal sendiri.

Pada tahun 1998 rasio modal sendiri terhadap total aset sebesar 99,20%. Dalam tahun ini terjadi peningkatan sebesar 0,02% dari tahun 1997. Penurunan ini diakibatkan dengan bertambahnya total aset yang diikuti oleh meningkatnya jumlah modal sendiri. Hal ini

berarti dari total aset yang ada dalam perusahaan 99,20%nya adalah modal sendiri.

Pada tahun 1999 rasio modal sendiri terhadap total aset sebesar 98,35%. Dalam tahun ini terjadi penurunan sebesar 0,008% dari tahun 1998. Hal ini berarti dari total aset yang ada dalam perusahaan 98,35%nya adalah modal sendiri.

Pada tahun 2000 rasio modal sendiri terhadap total aset sebesar 98,38%. Dalam tahun ini terjadi peningkatan sebesar 0,0003% dari tahun 1999. Hal ini berarti dari total aset yang ada diperusahaan 98,38%nya adalah modal sendiri.

2. Penilaian kinerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan yang diukur melalui tingkat kesehatan perusahaan.
 - a. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)

Diketahui bahwa besarnya skor untuk tahun 1997 sampai tahun 2000 berturut-turut adalah sebagai berikut ; 1, 1, 1, 10,5. Hal ini menunjukkan selama 4 tahun terakhir mengalami kenaikan.

Pada tahun 1997, 1998, 1999, besarnya skor 1 sedangkan besarnya skor maksimal 15. Selama tahun 1997 sampai tahun 1999 kemampuan atas ROE , kurang baik atau kurang efektif. Hal ini disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian.

Pada tahun 2000 skor ROE sangat baik. Pada tahun ini bobot yang diperoleh mendekati skor maksimal yaitu 10,5. Hal ini disebabkan karena perusahaan telah memperoleh laba.

b. Imbalan investasi (ROI)

Diketahui skor maksimal berdasarkan Surat Keputusan Menteri adalah 10. Pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 besarnya skor 0. Ini berarti selama tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 kemampuan ROI tidak baik.

Pada tahun 2000 skor ROI sebesar 10. Pada tahun ini kemampuan ROI sangat baik. Hal ini disebabkan perusahaan telah memperoleh laba, dimana pada tiga tahun sebelumnya mengalami kerugian.

c. Rasio kas

Pada tahun 1997 sampai tahun 2000, perkembangan rasio kas sangat baik. Berdasarkan hasil perhitungan yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri Keuangan skor yang diperoleh mencapai nilai maksimal atau sangat ideal. Ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang harus segera dipenuhi dengan kas dapat dipenuhi oleh perusahaan.

d. Rasio lancar

Pada tahun 1997 sampai tahun 2000, rasio lancar perusahaan dapat dikatakan sangat baik. Disini dapat dilihat nilai skor yang diukur berdasarkan Surat Keputusan Menteri tersebut adalah konstan yakni 3 atau dengan kata lain untuk rasio ini perusahaan memperoleh nilai mendekati maksimal. Skor ini berarti kemampuan

perusahaan untuk membayar hutangnya yang harus dipenuhi dengan aktiva lancar dapat dipenuhi atau dicapai oleh perusahaan.

e. *Collection periods*

Perkembangan *collection periods* dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 dapat dikatakan sangat baik. Disini dapat dilihat besarnya nilai atau skor yang diukur berdasarkan Surat Keputusan Menteri tersebut adalah konstan yakni sebesar 4, atau dengan kata lain untuk rasio ini perusahaan memperoleh nilai maksimal. Hal ini berarti bahwa periode yang dibutuhkan untuk mengumpulkan kembali piutang-piutang perusahaan dapat dilakukan dengan baik, dengan kata lain pengumpulan piutang tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

f. Perputaran persediaan

Perkembangan perputaran persediaan perusahaan dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 dapat dikatakan baik, karena pada tahun 1998 dan tahun 2000 skor yang diperoleh sebesar skor maksimal menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan yaitu sebesar 4. Perputaran persediaan pada PT Kereta Api (Persero) tidak begitu berpengaruh karena perusahaan ini perusahaan jasa yang bergerak dibidang angkutan bukan perusahaan dagang.

g. Perputaran total aset (TATO)

Perkembangan perputaran total aset dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 dapat dikatakan baik. Disini dapat dilihat skor

dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 ada peningkatan, walaupun skor setiap tahunnya tidak sebesar skor maksimal menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan yaitu 4. Ini berarti bahwa dana yang tertanam atau kemampuan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan *revenue* sudah cukup baik.

h. Rasio total modal sendiri terhadap total aset

Perkembangan rasio modal sendiri terhadap total aset dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 dapat dikatakan baik walaupun skor tiap tahun tidak sebesar maksimal menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan yaitu sebesar 6. Adapun skor yang diperoleh perusahaan dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 adalah 3,5, 3,5, 3,5, 3,5.

Tabel hasil analisis kinerja PT Kereta Api (Persero), DAOP VI Wilayah Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Indikator	Th 1997	Th 1998	Th 1999	Th 2000
a. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	1	1	1	10,5
b. Imbalan investasi (ROI)	0	0	0	10
c. Rasio kas	3	3	3	3
d. Rasio lancar	3	3	3	3
e. Collection periods	4	4	4	4
f. Perputaran persediaan	2	4	0,4	4
g. Perputaran total asset	1	3	3	4
h. Rasio modal sendiri terhadap total asset	3,5	3,5	3,5	3,5
Total	17,5	21,5	17,9	42

Perkembangan total bobot indikator dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 mengalami perbaikan. Pada tahun 1997 – 1999 total bobot masing-masing yaitu 17,5, 21,5, 17,9. Pada tahun 1997 – 1999 perkembangan tiap indikator kurang baik karena total bobot tiap tahun jauh dari total bobot maksimal. Pada tahun 2000 total bobot indikator sebesar 42, dapat dikategorikan baik karena mendekati total bobot maksimal yaitu 50.

BAB VI

PENUTUP

Dari hasil analisa terhadap laporan keuangan PT Kereta Api (Persero) Daop VI Yogyakarta, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Hasil perhitungan rasio keuangan PT Kereta Api (Persero) DAOP Yogyakarta dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 menunjukkan kinerja keuangan dalam kondisi yang kurang baik, sedangkan pada tahun 2000 kinerja keuangan perusahaan dalam kondisi yang baik. Dalam hal ini fluktuasi kinerja total bobot nilai tahun 1997 sebesar 17,5, tahun 1998 sebesar 21,5, tahun 1999 sebesar 17,9 dan tahun 2000 sebesar 42.

Pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1999 nilai yang dicapai perusahaan jauh dari maksimal, hal ini disebabkan karena selama tiga tahun tersebut perusahaan mengalami kerugian sehingga berpengaruh terhadap rasio-rasio keuangannya.

Pada tahun 2000 dimana perusahaan telah memperoleh laba, skor yang dicapai mendekati maksimal yakni 42, dimana skor maksimal menurut surat Keputusan Menteri Keuangan no.198/KMK.016/1998 sebesar 50. Dari tahun 1997 sampai dengan 1999 perkembangan perusahaan dalam kondisi kurang baik, tahun 2000 perkembangan perusahaan dalam kondisi baik.

perusahaan dalam kondisi kurang baik, tahun 2000 perkembangan perusahaan dalam kondisi baik.

B. Keterbatasan penelitian

1. Data yang diolah adalah data yang diperoleh dari PT Kereta Api (Persero) DAOP VI Yogyakarta dan penulis percaya bahwa data tersebut mencerminkan keadaan perusahaan sebenarnya dan kurang dapat melacak kebenaran data yang ada.
2. Penulis hanya dapat menilai perkembangan perusahaan selama empat periode akuntansi dan terbatas pada aspek keuangannya saja.

C. Saran

Berdasarkan analisa yang dilakukan dan beberapa kesimpulan yang telah diambil, maka saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Dengan kemajuan perkembangan tingkat rasio keuangan dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 yang mengarah pada laju perkembangan yang positif, maka perlu dipertahankan dan ditingkatkan sehingga kondisi keuangan perusahaan semakin baik.
2. Kondisi PT Kereta Api (Persero) DAOP IV dari tahun 1997 – 1999 dari segi keuangan masih kurang baik , sedangkan pada tahun 2000 perkembangan keuangannya sudah cukup baik dan berada kondisi sehat. Kondisi yang baik ini hendaknya terus dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Riyanto. (1998). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi 4. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada.
- Dwi Prastowo. (1995). *Analisis Laporan Keuangan Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Harnanto. (1982). *Akuntansi Keuangan Intermediate*. Yogyakarta: Liberty.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (1995). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Leopold A. Berntein. (1974). *Financial Statement Analysis Theory Application and Interpretation*. London: Richard D. Irwan, Inc.
- Lukman Syamsudin. (1987). *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Yogyakarta: YPLPM PT. Hanindih.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia (1998). Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/KMK.016/1998
- S. Munawir. (1984). *Analisa Laporan keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sarwoko dan Abdul Halim. (1989). *Manajemen Keuangan*. Edisi I. Yogyakarta: BPFE.
- Soediyono. (1983). *Analisa Laporan Keuangan, Analisis Ratio*. Yogyakarta: Liberty.
- Suad Husnan. (1997). *Manajemen Keuangan, Teori dan penerapan (keputusan jangka pendek dan jangka panjang)*. Yogyakarta: BPFE.
- Suwarsono. (1994). *Manajemen Strategik Konsep, Analisa dan Konsep*. Yogyakarta: AMP YKPN.

DAFTAR PERTANYAAN

I. Observasi Dokumentasi

1. Kapan perusahaan didirikan ?
2. Apa nama dan bentuk perusahaan pada saat didirikan ?
3. Apa landasan hukum pendirian perusahaan ?
4. Apa tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan ?
5. Apakah ada kerjasama dengan pihak lain, siapa dan dalam bidang apa saja ?
6. Bagaimana bentuk struktur organisasi perusahaan ?
7. Bagaimana tugas dan kewajiban masing-masing bagian dalam struktur organisasi?
8. Bagaimana tanggungjawab masing-masing bagian dan kepada siapa saja ?
9. Upaya apa yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan pelayanannya ?
10. Bagaimana cara untuk memperoleh tenaga kerja ?
11. Bagaimana sistem pengupahan tenaga kerja ?
12. Bagaimanakah cara yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan tenaga kerja yang ada ?
13. Apa yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang dimilikinya ?
14. Apakah ada tunjangan atau jaminan sosial yang diberikan perusahaan untuk tenaga kerja ?
15. Apa saja bentuk fasilitas yang disediakan perusahaan untuk tenaga kerja ?
16. Perusahaan bergerak dalam bidang apa saja ?
17. Tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan pelayanannya ?
18. Apakah ada kebijakan-kebijakan akuntansi yang khusus di terapkan oleh perusahaan, apa saja ?
19. Bagaimana keadaan laporan keuangan perusahaan (Neraca dan Laporan Laba-rugi) pada tahun 1997 sampai dengan 2000 ?
20. Bagaimana perkembangan laba perusahaan selama tahun 1997 sampai dengan 2000 ?



II. Wawancara

1. Apa dampak sosial perusahaan terhadap masyarakat ?
2. Apa saja pelayanan yang diberikan oleh perusahaan ?
3. Apa saja sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan jasa dan apakah sudah mencukupi ?
4. Bagaimana tingkat kesehatan keuangan perusahaan pada tahun 1997 - 2000 ?
5. Bagaimana cara menghitung tingkat keuangan perusahaan ?
6. Apa saja yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan ?

PT. KERETA API (PERSERO)
DAERAH OPERASI VI JOGYAKARTA
LABA/RUGI SELAMA TAHUN 1997 S/D 2000

URAIAN	2000	1999	1998	1997
PENDAPATAN OPERASI				
a. Angkutan Penumpang	109,096,602,961	58,361,222,563	68,022,732,125	47,517,573,040
b. Pendapatan Suplisi	346,250,700	299,461,200	117,781,650	109,193,700
c. Angkutan Begasi	20,927,900	24,159,750	47,211,450	35,102,100
d. Angkutan Barang	10,784,718,371	2,840,512,108	2,878,400,908	1,492,569,565
e. Pendapatan Operasi Lainnya	223,502,511	108,316,932	264,386,087	117,252,070
f. Pend. Penunjang Angk. Barang				
g. Pendapatan Bea Setasiun	147,006,600	86,280,200	159,393,200	69,326,100
Jumlah Pendapatan Operasi	120,619,009,043	61,722,952,753	71,489,905,420	49,341,016,575
Kompensasi Pemerintah				
Jumlah (1+2)	120,619,009,043	61,722,952,753	71,489,905,420	49,341,016,575
BIAYA OPERASI LANGSUNG (BOL)				
a. Angkutan KA				
1) Bahan Bakar	6,927,635,379	4,496,174,463	5,062,872,077	3,613,620,574
2) Pemeliharaan Sarana	19,517,967,377	23,950,103,378	27,048,384,649	35,500,312,293
3) Pegawai				
a) Operasi	6,737,248,350	3,413,105,719	4,162,546,401	3,325,081,291
b) Pemeliharaan Sarana	2,954,723,252	2,413,516,782	3,304,355,948	3,704,905,584
Jumlah 3)	9,391,971,602	5,826,622,501	7,466,902,349	7,029,986,875
4) Pemilikan				
a) Peny. Sarana Gerak	4,440,927,929	2,690,132,417	2,378,563,496	2,344,735,092
b) Asuransi Sarana Gerak				
c) Asuransi Angk. Barang				
Jumlah 4)	4,440,927,929	2,690,132,417	2,378,563,496	2,344,735,092
Jumlah BOL Angkutan KA	40,278,502,287	36,963,032,759	41,956,722,571	48,488,654,834
b. Penunjang Angkutan KA				
1) Biaya Langsung Restorka				
2) Tusiag				
3) Angkutan Lanjutan				
4) Biaya Operasi TPK				
Jumlah BOL Penunjang Angk. KA				
Jumlah BOL	40,278,502,287	36,963,032,759	41,956,722,571	48,488,654,834
BIAYA OPERASI TAK LANGSUNG				
a. Pemeliharaan Prasarana Pokok	8,663,702,826	4,731,559,555	5,667,097,084	2,862,705,511
b. Pegawai Pemel. Prasarana Pokok	7,039,216,734	3,360,992,759	4,618,770,666	3,942,257,775
c. Pemel. Prasarana Pendukung	1,867,072,114	1,318,456,043	1,578,266,370	480,648,767
d. Penyust. Prasarana Pendukung	506,556,399	262,278,005	123,461,695	116,890,287
e. Biaya Umum Setasiun Langsir				
1) Pegawai	6,402,572,675	3,203,930,222	4,239,437,163	3,468,442,649
2) Lainnya	1,263,246,979	228,007,472	449,299,717	264,920,979
Jumlah e.	7,665,819,654	3,341,937,694	4,688,736,880	3,733,363,628
f. Malapetaka	1,701,000			
g. Biaya Umum Pegawai TPK				
h. Asurs. Prasarana Pendukung				
Jumlah BOTL	25,744,068,727	13,105,224,056	16,676,332,695	11,135,865,968
Jumlah Biaya Operasi	66,022,571,014	50,068,256,815	58,633,055,266	59,624,520,802
Laba Rugi Operasi (3-7)	54,596,438,029	11,654,695,938	12,856,850,154	(10,283,504,227)

URAIAN	2000	1999	1998	1997
BIAYA UMUM				
a. Biaya Pegawai				
1) Peg. Umum Depo	1,012,445,953	938,918,569	1,278,274,799	921,728,895
2) Peg. Umum Inst. Tetap	2,193,515,932	1,440,651,974	1,952,942,605	1,365,931,201
3) Peg. Umum Daop	4,977,123,452	2,279,546,201	3,231,812,237	2,220,840,841
4) Peg. Umum Balai yasa	6,084,648,488	2,308,308,470	3,344,648,699	2,504,473,080
5) Peg. Umum Gudang	390,380,438	188,305,042	208,882,006	158,487,540
6) Peg. Umum PGM	60,789,205			
7) Peg. Umum Restorka				
8) Peg. Umum BPLT	891,030,529	387,039,522	584,606,333	455,811,799
b. Biaya Penjualan	291,582,386	6,787,900	36,342,050	43,922,357
c. Biaya Pendidikan	888,482,351	25,602,500	87,022,053	112,624,000
d. Bi. Penelt. & Pengembangan				
e. Biaya Umum Restorka				
f. Biaya Umum Balai Grafika				
g. Biaya Umum PGM				
h. Biaya Umum Wilu				
i. Biaya Umum Daop	8,460,702,329	4,065,386,579	4,556,914,156	2,869,777,385
j. Biaya Umum Balai Yasa	4,232,580,794	2,885,966,672	3,732,106,583	1,389,557,980
k. Biaya Umum Instalasi Tetap	1,807,879,143	839,572,516	482,244,234	189,325,660
l. Biaya Umum Depo	413,305,066	375,835,764	785,119,799	594,721,366
m. Biaya Umum Gudang	110,912,984	131,465,813	62,232,216	195,494,113
n. Biaya Umum Inklaring				
o. Biaya Umum TPK	581,900			
p. BU Mess/Wisma/Peristirahat	298,056,190	126,446,996	262,617,021	142,993,888
q. Biaya Umum Pendidikan		422,067,279	971,845,419	373,282,394
r. Biaya Umum BPLT	290,649,383	114,933,969	253,016,342	183,431,018
s. Proyek BTBD				
t. Selisih Persediaan	(292,180,416)			
u. Bi. Penyusutan AT Fasilitas	675,454,896	563,181,182	919,828,898	927,845,011
v. Pajak Bumi dan Bangunan	186,910,606			
w. Bi. Cad. Piutang Rata-Rata	44,100			
Jumlah Biaya Umum 9.	32,974,895,709	17,100,016,948	22,750,455,450	14,650,248,528
LABA (RUGI) USAHA	21,621,542,320	(5,445,321,010)	(9,893,605,296)	(24,933,752,755)
PEND. & BIAYA NON OPERASI				
a. Usaha Tambahan				
1) a) Pend. Penjualan Tehnis	17,725,674		45,306,973	20,890,500
c) Bi. Penjualan Js Tehnis				
Jumlah 1)	17,725,674		45,306,973	20,890,500
2) Iklan	97,210,820	36,112,400	62,806,512	22,036,000
3) KSO				
Jumlah a.	114,936,494	36,112,400	108,113,485	42,926,500
b. Persewaan	1,137,840,571	286,887,660	248,810,306	260,646,471
c. Lain-lain	2,040,899,032	1,126,106,820	2,770,001,984	844,590,128
LABA (RUGI) NON OPERASI	3,293,676,097	1,449,106,880	3,126,935,775	1,148,163,099
LABA (RUGI) PERUSAHAAN SEBELUM POS LUAR BIASA	24,915,218,417	(3,996,214,130)	(6,766,669,521)	(23,785,589,656)
LABA (RUGI) LUAR BIASA R/L Penjualan Asset				
LABA (RUGI) PERUSAHAAN SETELAH POS LUAR BIAYA	24,915,218,417	(3,996,241,130)	(6,766,669,521)	(23,785,589,656)

PT. KERETA API (PERSERO)
DAERAH OPERASI 6 JOGJAKARTA
LAPORAN KEUANGAN (NERACA DAN LABA/RUGI) TAHUN BUKU 1997 S/D 2000

NO	URAIAN	PER 12/31/00	PER 12/31/99	PER 12/31/98	PER 12/31/97
I	AKTIVA LANCAR				
1	Kas dan Bank	8,369,080,115	4,608,257,444	6,289,422,265	4,279,410,320
2	Deposito	1,000,000,000	2,700,000,000	5,400,000,000	3,500,000,000
3	Piutang Niaga	1,345,217,971	197,988,426	440,893,040	337,705,300
4	Piutang Pegawai	26,834,764	17,466,704	36,949,226	32,079,750
5	Piutang Lain-lain	1,962,425,133	3,613,184,971	1,929,243,221	1,117,997,802
6	Cad. Piutang Ragu-ragu	(44,100)		(7,820,980)	(6,300,390)
7	Persediaan Normal	54,068,070,754	46,298,931,197	22,613,595,583	20,564,636,255
8	Pendapatan yang masih harus diterima	3,446,042	13,401,667	116,726,841	26,066,677
9	Biaya bayar dimuka		12,500,000		
10	Pajak Bayar dimuka				
	Jumlah Aktiva Lancar	66,775,030,679	57,461,730,409	36,819,009,196	29,851,595,714
II	AKTIVA TETAP				
1	Sarana Gerak				
	a. Lokomotif Uap				
	b. Lokomotif Diesel	8,461,675,822	8,393,445,182	19,286,444,065	18,818,129,341
	c. Kereta Rel Diesel	8,807,059,278	8,807,059,278		
	d. Kereta Penumpang	60,607,276,517	59,973,967,657	82,102,266,924	69,903,987,124
	e. Gerbong Barang				
	Jumlah Sarana Gerak	77,876,011,617	77,174,472,117	101,388,710,989	88,722,116,465
2	Prasarana				
	a. Inst. Telekomunikasi	26,761,003	26,761,003	344,290,972	332,120,972
	b. Inst. Listrik	207,193,480	207,193,480	262,617,377	262,617,377
	c. Inst Air & Minyak	224,569,007	224,569,007	335,348,805	172,310,805
	d. Gedung	3,754,402,198	3,192,177,198	3,592,802,442	3,374,582,442
	e. Rumah Dinas	79,400	79,400	979,043,145	979,043,145
	f. Tanah	1,312,950,703	1,312,950,703	2,201,327,991	2,201,327,991
	Jumlah Prasarana	5,525,955,791	4,963,730,791	7,715,430,732	7,322,002,732
3	Fasilitas				
	a. Kendaraan Bermotor	153,542,092	105,542,092	609,447,295	583,967,295
	b. Barang Inventaris	1,002,387,216	934,367,216	2,658,820,947	2,188,557,450
	c. Mesin dan Peralatan	3,470,350,238	3,023,986,602	5,149,570,485	4,495,135,945
	d. Inst. Yang Bergerak	59,916,147	59,916,147	2,232,878,788	2,232,878,788
	Jumlah Fasilitas	4,686,195,693	4,123,812,057	10,650,717,515	9,500,539,478
	Jumlah Aktiva Tetap	88,088,163,101	86,262,014,965	119,754,859,236	105,544,658,675
	Akumulasi Penyusutan	(9,265,099,893)	(3,548,379,466)	(28,173,513,599)	(24,643,723,525)
	Nilai Buku	78,823,063,208	82,713,635,499	91,581,345,637	80,900,935,150
	AKTIVA LAIN-LAIN				
1	Aktiva dalam Penyelesaian				
	a. Pekerjaan dalam Penyelesaian	931,734,749	444,739,906	694,624,622	1,408,309,096

b.AT dalam Penyelesaian		365,446,250		
c. Produk Selesai				
2 Barang Dalam Perjalanan				
3 Persediaan Non Produktif				
a. Persed. Slow Moving	715,277,758	579,018,690	1,441,208,872	2,356,581,620
b. Persed Tak Terpakai	6,102,970,311	7,436,704,120	6,287,668,350	5,944,712,524
c. Scrap		103,652,798		
4 Rek. Ant. Peng. Persediaan	404,247,640	148,455,214	107,243,000	99,266,896
5 Aktiva Tetap Non Produktif				
a. A.T.D.O	3,180,377,608	3,180,377,608	8,989,737,157	9,246,220,375
b. Tanah Lint Non Op	4,841,155,254	4,841,155,254		
c. AT dikuasai Pihak ke III	3,159,587	3,159,587		
Jumlah AT Non Produktif	8,024,692,449	8,024,692,449	8,989,737,157	9,246,220,375
Jumlah Aktiva Lain-lain	16,178,922,907	17,102,709,427	17,520,482,001	19,055,090,511
Jumlah Aktiva	161,777,016,794	157,278,075,335	145,920,836,834	129,807,621,375
KEWAJIBAN HUTANG				
1 Hutang pada Pemerintah	653,281,006	441,059,261	955,110,505	287,516,541
2 Hutang Pihak Ketiga	5,538,747,373	4,075,734,810	5,149,536,648	1,969,494,420
3 Hutang kepada Pegawai	975,242,780	41,606,724	75,189,275	2,172,311,307
4 Hutang Lain-lain	178,800,074	1,272,023,324	3,586,560	11,570,525
5 Pendapatan diterima dimuka				90,744,433
6 Beban yang akan dibayar	5,565,142,142	5,400,914,301	2,606,083,678	1,452,739,020
Jumlah Hutang	12,911,213,375	11,231,338,420	8,789,506,666	5,984,376,246
REK. KORAN KANTOR PUSAT RKKP((R/L TAHUN BERJALAN)	111,207,105,704	106,507,188,521	106,127,432,623	65,320,524,126
	24,915,218,417	(3,996,214,130)	(6,766,669,521)	(23,785,589,656)
SALDO RKKP	136,122,324,121	102,510,974,391	99,360,763,102	41,534,934,470
REK. KORAN DENGAN ESS	(2,967,209,919)	(2,533,491,259)	(1,983,036,715)	(1,220,979,329)
REK. KORAN DENGAN ESB	(238,706,698)	(195,373,068)	(118,204,827)	56,803,610
REK. KORAN DENGAN ESU	(7,091,303,155)	(5,904,788,864)	(5,523,185,427)	(142,380,918)
REK. PEMINDAH BUKUAN DENGAN : WILU JAWA				4,233,795,182
DAOP JABOTABEK	(3,482,740,371)	(3,009,086,651)		
DAOP 1 JAKARTA	(6,623,011,882)	6,289,885,303	6,862,659,286	6,837,235,279
DAOP 2 BANDUNG	120,794,355,655	110,286,253,653	75,348,651,095	76,971,992,475
DAOP 3 CIREBON	(3,809,224,269)	(941,116,653)	(913,914,379)	(162,442,768)
DAOP 4 SEMARANG	(3,788,741,530)	(2,398,153,922)	2,538,512,934	4,655,081,668
DAOP 5 PURWOKERTO	(21,673,841,044)	(12,603,890,296)	(4,204,864,410)	(4,075,669,989)
DAOP 7 MADIUN	(34,360,940,341)	(26,485,141,693)	(18,347,120,342)	93,893,667
DAOP 8 SURABAYA	(22,258,170,955)	(19,189,815,717)	(15,805,362,857)	(4,843,716,512)
DAOP 9 JEMBER	(1,756,986,193)	220,481,691	(83,567,292)	(115,301,706)
JUMLAH RPB	23,040,699,070	52,169,415,715	45,394,994,035	83,594,867,296
JUMLAH PASIVA	161,777,016,794	157,278,075,335	145,920,836,834	129,807,621,375

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 198/KMK.016/1998 tanggal 24 Maret 1998)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAB II
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
Pasal 3

Menimbang :

- a. Bahwa perkembangan dunia usaha dalam situasi perekonomian yang semakin terhuka, perlu dilandasi dengan serana sistem penilaian kesehatan BUMN yang mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing;
- b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali sistem penilaian kinerja BUMN yang dapat mencerminkan kondisi kesehatan perusahaan dengan memperhatikan kaedah penilaian kesehatan perusahaan yang berlaku umum;
- c. bahwa perubahann tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (BN No. 1776 hal. 9A-10A) (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (BN No. 5686 hal. 1B-21B) tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 (BN No. 6121 hal. 4B-10B) tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 (BN No. 6118 hal. 15B-18B) tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
6. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN
USAHA MILIK NEGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998.
- Anak Perusahaan BUMN adalah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang sekurang-kurangnya 51% sahamnya dimiliki oleh BUMN.

Pasal 2

1. Penilaian tingkat kesehatan BUMN berlaku bagi seluruh BUMN non jasa keuangan maupun BUMN jasa keuangan kecuali Persero Terbuka dan BUMN yang dibentuk dengan Undang-Undang tersendiri.
2. BUMN non jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dibidang infrastruktur dan non infrastruktur sebagaimana pada Lampiran I.
3. BUMN jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

- (1) Tingkat kesehatan BUMN digolongkan menjadi :

- a. SEHAT, yang terdiri dari :
 - AAA apabila total skor (TS) lebih besar dari 95
 - AA apabila $80 < TS < = 95$
 - A apabila $65 < TS < = 80$
- b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari :
 - BBB apabila $50 < TS < = 65$
 - BB apabila $40 < TS < = 50$
 - B apabila $30 < TS < = 40$
- c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari :
 - CCC apabila $20 < TS < = 30$
 - CC apabila $10 < TS < = 20$
 - C apabila $TS < = 10$

- (2) Tingkat kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian :

- a. Aspek Keuangan.
- b. Aspek Operasional.
- c. Aspek Administrasi.

- (3) Penilaian tingkat kesehatan BUMN sesuai keputusan ini hanya diterapkan bagi BUMN apabila hasil pemeriksaan akuntan terhadap perhitungan keuangan tahunan perusahaan yang bersangkutan dinyatakan dengan kualifikasi "Wajar Tanpa Pengecualian" atau "Wajar Dengan Pengecualian" dari akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

- (4) Penilaian tingkat kesehatan BUMN ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum.

BAB III
BADAN USAHA MILIK NEGARA NON JASA KEUANGAN
Pasal 4

- (1) Penilaian tingkat kesehatan BUMN yang bergerak dibidang non jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur selanjutnya disebut BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN yang bergerak dalam bidang non infrastruktur yang selanjutnya disebut BUMN NON INFRASTRUKTUR dengan pengelompokan sebagaimana pada lampiran I.
- (2) Perubahan pengelompokan BUMN dalam kategori BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN NON INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan BUMN.

Pasal 5

- (1) BUMN INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, yang bidang usahanya meliputi :
 - a. Pembangunan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik.
 - b. Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang baik laut, udara atau kereta api.
 - c. Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau, lapangan terbang dan bandara.
 - d. Bendungan dan irigasi.
- (2) Penambahan atau pengurangan bidang-bidang atau jenis-jenis kegiatan untuk menentukan kriteria BUMN INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan BUMN.
- (3) BUMN NON INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang bidang usahanya diluar bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

Indikator penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional dan Aspek Administrasi BUMN yang bergerak dibidang usaha non jasa keuangan sebagaimana terdapat dalam Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN non jasa keuangan (Lampiran II).

BAB IV

BADAN USAHA MILIK NEGARA JASA KEUANGAN

Pasal 7

Penilaian tingkat kesehatan BUMN jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

Pasal 8

Pengelompokan BUMN yang bergerak dalam bidang usaha jasa keuangan dan indikator penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional dan Aspek Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan tersendiri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

BUMN wajib menerapkan penilaian tingkat kesehatan BUMN berdasarkan keputusan ini kepada Anak Perusahaan BUMN sesuai dengan bidang usaha Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dianggap tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku untuk penilaian tingkat kesehatan BUMN tahun buku 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Maret 1998
MENTERI KEUANGAN,
ttd.

FUAD BAWAZIER

LAMPIRAN I :

TABEL KELOMPOK BUMN
INFRASTRUKTUR DAN NON INFRASTRUKTUR

NO.	BUMN INFRASTRUKTUR	NO.	BUMN NON INFRASTRUKTUR
1.	ANGKASA PURA I, PT	1.	ADHI KARYA, PT
2.	ANGKASA PURA II, PT	2.	AMARTA KARYA, PT
3.	ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN, PT	3.	BALAI PUSTAKA, PT
4.	DAMRI, PERUM	4.	BARATA INDONESIA, PT
5.	JASA MARGA, PT	5.	BATAN TEKNOLOGI, PT
6.	JASA TIRTA, PERUM	6.	BHANDA GHARA REKSA, PT
7.	KERET API, PERUM	7.	BINA KARYA, PT
8.	OTORITA JATILUHUR, PERUM	8.	BIO FARMA, PT
9.	PPD, PERUM	9.	BIRO KLASIFIKASI IND., PT
10.	PEL. INDONESIA I, PT	10.	BOMA BISMA INDRA, PT
11.	PEL. INDONESIA II, PT	11.	GRANTAS ABIPRAYA, PT
12.	PEL. INDONESIA III, PT	12.	CAMBRICS PRIMISSIMA, PT
13.	PEL. INDONESIA IV, PT	13.	CIPTA NIAGA, PT
14.	PERUMNAS, PERUM	14.	DAHANA, PT
15.	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA, PT	15.	DHARMA NIAGA, PT
16.	PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA, PERUM	16.	DJAKARTA LLOYD, PT
		17.	DOK DAN PERKAPALAN KOJA BAHARI, PT
		18.	DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA, PT
		19.	GARAM, PT
		20.	GARUDA INDONESIA, PT
		21.	HOTEL INDONESIA INTERNATIONAL, PT
		22.	HUTAMA KARYA, PT
		23.	INDAH KARYA, PT
		24.	INDOFARMA, PT
		25.	INDRA KARYA, PT
		26.	INDUSTRI GELAS, PT
		27.	INDUSTRI KAPAL INDONESIA, PT
		28.	INDUSTRI KERETA API, PT
		29.	INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA, PT
		30.	INDUSTRI SANDANG I, PT
		31.	INDUSTRI SANDANG II, PT
		32.	INDUSTRI SODA INDONESIA, INDONESIA, PT
		33.	INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA, PT
		34.	INHUTANI I, PT
		35.	INHUTANI II, PT
		36.	INHUTANI III, PT
		37.	INHUTANI IV, PT
		38.	INHUTANI V, PT
		39.	ISTAKA KARYA, PT
		40.	JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG, PT
		41.	KAMASAN BERIKAT NUSANTARA, PT
		42.	KAMASAN INDUSTRI CILACAR, PT
		43.	KAMASAN INDUSTRI MAKASAR, PT
		44.	KAMASAN INDUSTRI MEDAN, PT
		45.	KERTAS KRAFT ACEH, PT
		46.	KERTAS LECES, PT
		47.	KERTAS PADALARANG, PT
		48.	KIMIA FARMA, PT
		49.	KLIRING DAN JAMINAN BURE KOMODITI, PT
		50.	KONEBA, PT
		51.	KRAKATAU STEEL, PT
		52.	LEM INDUSTRI, PT
		53.	MEGA ELTRA, PT
		54.	MERPATI NUSANTARA AIR- WAYS, PT
		55.	NATOUR, PT
		56.	NINDYA KARYA, PT
		57.	PAL INDONESIA, PT
		58.	PRASADA PAMUNAH LIMBAH, PT
		59.	PDI PULAU BATAM, PT
		60.	PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA, PT
		61.	PELNI, PT
		62.	PEMBANGUNAN PERUMAHAN BALI, PT
		63.	PENGEMBANGAN PARIWISATA BALI, PT
		64.	PENGERUKAN INDONESIA, PT
		65.	PERCETAKAN NEGARA RI, PT
		66.	PERIKANAN NUSANTARA, PT
		67.	PERKEBUNAN NUSANTARA I, PT
		68.	PERKEBUNAN NUSANTARA II, PT
		69.	PERKEBUNAN NUSANTARA III, PT
		70.	PERKEBUNAN NUSANTARA IV, PT
		71.	PERKEBUNAN NUSANTARA V, PT
		72.	PERKEBUNAN NUSANTARA VI, PT
		73.	PERKEBUNAN NUSANTARA VI, PT
		74.	PERKEBUNAN NUSANTARA VII, PT
		75.	PERKEBUNAN NUSANTARA VIII, PT
		76.	PERKEBUNAN NUSANTARA IX, PT
		77.	PERKEBUNAN NUSANTARA X, PT
		78.	PERKEBUNAN NUSANTARA XII, PT
		79.	PERKEBUNAN NUSANTARA XIII, PT
		80.	PERKEBUNAN NUSANTARA XIV, PT
		81.	PERURI, PERUM
		82.	PERUSAHAAN GAS NEGARA, PT
		83.	PERHUTANI, PERUM
		84.	PERHOTELAN DAN PERKANTORAN INDONESIA, PT
		85.	PERTANI, PT
		86.	PINDAD, PT
		87.	POS INDONESIA, PT
		88.	PRADNYA PARAMITA, PT
		89.	PRODUKSI FILM NEGARA, PERUM
		90.	PUPUK SRIMIDJAJA, PT
		91.	RAJAWALI NUSANTARA INDO- NESIA, PT
		92.	SANG NYANG SERI, PT
		93.	SARANA KARYA, PT
		94.	SARINAH, PT
		95.	SEMEN BATURAJA, PT
		96.	SEMEN KUPANG, PT
		97.	SUCOFINDO, PT
		98.	SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT, PT
		99.	SURVEY UDARA, PT
		100.	SURVEYOR INDONESIA, PT
		101.	TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM, PT
		102.	TWC BOROBUDUR, PRAMBANAN DAN RATU BOKO, PT
		103.	VIRAMA KARYA, PT
		104.	WASKITA KARYA, PT
		105.	WIJAYA KARYA, PT
		106.	YODYA KARYA, PT
		107.	VARUNA TIRTA PRAKARSA, PT

LAMPIRAN II :

TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEMATAN BUMI NON JASA KEUANGAN

1. ASPEK KEUANGAN

1. Total Bobot
 BUMN INFRASTRUKTUR (Infra) 50
 BUMN NON INFRASTRUKTUR (Non infra) 70

2. Indikator yang dinilai dan masing masing bobotnya. Dalam penilaian aspek keuangan ini, indikator yang dinilai dan masing masing bobotnya adalah seperti pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 : Daftar indikator dan bobot aspek keuangan.

Indikator	B o b o t	
	Infra	Non Infra
1. Imbalan kpd pemegang saham (ROE)	15	20
2. Imbalan investasi (ROI)	10	15
3. Rasio Kas	3	5
4. Rasio Lancar	4	5
5. Collection periods	4	5
6. Perputaran persediaan	4	5
7. Perputaran total asset	4	5
8. Rasio modal sendiri terhadap total Aktiva	6	10
Total Bobot	50	70

3. Metode Penilaian
 a. Imbalan kepada pemegang saham/Return On Equity (ROE)

Rumus

$$ROE = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Definisi :

- Laba Setelah Pajak adalah Laba Setelah Pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari :
 - * Aktiva Tetap
 - * Aktiva Non Produktif
 - * Aktiva Lain-lain
 - * Saham Penyertaan Langsung.
- Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen Modal Sendiri yang digunakan untuk membiayai Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Dalam Modal Sendiri tersebut diatas termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya.
- Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan adalah posisi pd akhir tahun buku Aktiva Tetap yang sedang dalam tahap pembangunan.

Tabel 2 : Daftar skor penilaian ROE

ROE (%)	S k o r	
	Infra	Non Infra
15 < ROE	15	20
13 < ROE <= 15	13.5	18
11 < ROE <= 13	12	16
9 < ROE <= 11	10.5	14
7,9 < ROE <= 9	9	12
6,6 < ROE <= 7,9	7.5	10
5,3 < ROE <= 6,6	6	8.5
4 < ROE <= 5,3	5	7
2,5 < ROE <= 4	4	5.5
1 < ROE <= 2,5	3	4
< ROE <= 1	1.5	2
ROE <= 0	1	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) mempunyai ROE 10%, maka sesuai tabel 2 skor untuk indikator ROE adalah 14.

- b. Imbalan Investasi/Return On Investment (ROI)

Rumus

$$ROI = \frac{EBIT + Penyusutan}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Definisi

- EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan dari :
 - > Aktiva Tetap
 - > Aktiva Lain-lain
 - > Aktiva Non Produktif
 - > Saham penyertaan langsung.
- Penyusutan adalah Depresiasi, Amortisasi dan Deplesi.
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku Total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan.

Tabel 3 : Daftar skor penilaian ROI.

ROI (%)	S k o r	
	Infra	Non Infra
18 < ROI	10	15
15 < ROI <= 18	9	13.5
13 < ROI <= 15	8	12
12 < ROI <= 13	7	10.5
10,5 < ROI <= 12	6	9
9 < ROI <= 10,5	5	7.5
7 < ROI <= 9	4	6
5 < ROI <= 7	3.5	5
3 < ROI <= 5	3	4
1 < ROI <= 3	2.5	3
0 < ROI <= 1	2	2
ROI <= 0	0	1

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Infra) memiliki ROI 14%, maka sesuai tabel 3 skor untuk indikator ROI adalah 8.

- c. Rasio Kas/Cash Ratio

Rumus

$$\text{Cash ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Bank} + \text{Srt Berharga Jgk Pendek}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Definisi

- Kas, Bank dan Surat Berharga Jangka Pendek adalah posisi masing-masing pada akhir tahun buku.
- Current Liabilities adalah posisi seluruh kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 4 : Daftar skor penilaian cash ratio

Cash Ratio = x (%)	S k o r	
	Infra	Non Infra
25 < X <= 35	3	5
15 < X <= 25	2.5	4
10 < X <= 15	2	3
5 < X <= 10	1.5	2
0 < X <= 5	1	1
	0	0

Contoh perhitungan

PT "A" (BUMN Infra) memiliki cash ratio sebesar 32%, maka sesuai tabel 4 skor untuk indikator cash ratio adalah 2,5.

- d. Rasio Lancar/Current Ratio

Rumus :

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Definisi

- Current Asset adalah posisi Total Aktiva Lancar pada akhir tahun buku.
- Current Liabilities adalah posisi Total Kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 5 : Daftar skor penilaian current ratio

Current Ratio = X (%)	S k o r	
	Infra	Non Infra
125 <= X	3	5
110 <= X < 125	2.5	4
100 <= X < 110	2	3
95 <= X < 100	1.5	2
90 <= X < 95	1	1
X < 90	0	0

Contoh perhitungan

PT "A" (BUMN Non Infra) memiliki current ratio sebesar 115%, maka sesuai tabel 5 skor untuk indikator Current Ratio adalah 4.

- e. Collection Periods (CP)

Rumus

$$CP = \frac{\text{Total Piutang Usaha}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari}$$

Definisi

- Total Piutang Usaha adalah posisi Piutang Usaha setelah dikurangi Cadangan Penyisihan Piutang pada akhir tahun buku.
- Total Pendapatan Usaha adalah jumlah Pendapatan Usaha selama tahun buku.

Tabel 6 : Daftar skor penilaian collection periode

PP = X (hari)	Perbaikan = X (hari)	S k o r	
		Infra	Mon Infra
X <= 60	X >= 35	4	5
60 < X <= 90	30 < X <= 35	3,5	4,5
90 < X <= 120	25 < X <= 30	3	4
120 < X <= 150	20 < X <= 25	2,5	3,5
150 < X <= 180	15 < X <= 20	2	3
180 < X <= 210	10 < X <= 15	1,6	2,4
210 < X <= 240	6 < X <= 10	1,2	1,8
240 < X <= 270	3 < X <= 6	0,8	1,2
270 < X <= 300	1 < X <= 3	0,4	0,6
300 < X	0 < X <= 1	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 6 diatas.

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :
PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 120 hari dan pada tahun 1998 sebesar 127 hari.
Sesuai tabel 6 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :
- Tingkat Collection Periods : 4
- Perbaikan Collection Periods (7 hari) : 1,8
Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 4

Contoh 2 :
PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.
Sesuai tabel 6 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :
- Tingkat Collection Periods : 1,2
- Perbaikan Collection Periods (32 hari) : 3,5
Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

f. Perputaran Persediaan (PP)

Rumus

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365$$

Definisi

- Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang.
- Total Pendapatan Usaha adalah Total Pendapatan Usaha Dalam tahun buku yang

Tabel 7 : Daftar skor penilaian perputaran persediaan

PP = X (hari)	Perbaikan (hari)	S k o r	
		Infra	Mon Infra
X <= 60	35 < X	4	5
60 < X <= 90	30 < X <= 35	3,5	4,5
90 < X <= 120	25 < X <= 30	3	4
120 < X <= 150	20 < X <= 25	2,5	3,5
150 < X <= 180	15 < X <= 20	2	3
180 < X <= 210	10 < X <= 15	1,6	2,4
210 < X <= 240	6 < X <= 10	1,2	1,8
240 < X <= 270	3 < X <= 6	0,8	1,2
270 < X <= 300	1 < X <= 3	0,4	0,6
300 < X	0 < X <= 1	0	0

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 7 diatas.

Contoh Perhitungan

Contoh 1 :
PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 180 hari dan pada tahun 1998 sebesar 195 hari.
Sesuai tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :
- Tingkat Perputaran Persediaan : 3
- Perbaikan Perputaran Persediaan (15 hari) : 2,4
Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3

Contoh 2 :
PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.
Sesuai tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :
- Tingkat Perputaran Persediaan : 1,2
- Perbaikan Perputaran Persediaan (32 hari) : 3,5
Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

g. Perputaran Total Aset/Total Asset Turn Over (TAIO)

Rumus :

$$TAIO = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Definisi

- Total Pendapatan adalah Total Pendapatan Usaha dan Usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan Aktiva Tetap.
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap Dalam Pelaksana.

Tabel 8 : Daftar skor penilaian perputaran total aset

TATO = X (%)	Perbaikan = X (%)	S k o r	
		Infra	Mon Infra
120 < X	20 < X	4	5
105 < X <= 120	15 < X <= 20	3,5	4,5
90 < X <= 105	10 < X <= 15	3	4
75 < X <= 90	5 < X <= 10	2,5	3,5
60 < X <= 75	0 < X <= 5	2	3
40 < X <= 60	X <= 0	1,5	2,5
20 < X <= 40	X <= 0	1	2
X <= 20	X <= 0	0,5	1,5

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 8 diatas.

Contoh perhitungan

Contoh 1 :
PT "A" (BUMN Non Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 70% dan pada tahun 1998 sebesar 60% hari.
Sesuai tabel 8 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :
- Tingkat Perputaran Total Asset : 3
- Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 2,5
Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3

Contoh 2 :
PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset 108% dan pada tahun 1998 sebesar 98%.
Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :
- Tingkat Perputaran Total Asset : 3,5
- Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 2,5
Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

h. Rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset (TMS terhadap Total Asset)

Rumus

$$TMS \text{ thd TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Definisi

- Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.
- Total Asset adalah Total Asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada posisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 9 : Daftar skor penilaian Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

TMS thd TA (%) - X	S k o r	
	Infra	Non Infra
0 <= X <= 10	0	0
10 <= X <= 20	2	4
20 <= X <= 30	3	6
30 <= X <= 40	4	7,25
40 <= X <= 50	5,5	9
50 <= X <= 60	5	8,5
60 <= X <= 70	4,5	8
70 <= X <= 80	4,25	7,5
80 <= X <= 90	4	7
90 <= X <= 100	3,5	6,5

Contoh perhitungan
PT "B" (BUMN Non Infra) memiliki rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset sebesar 35%, maka sesuai tabel 9 skor untuk indikator rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset adalah 10.

ASPEK OPERASIONAL

Total Bobot	
- BUMN INFRASTRUKTUR	35
- BUMN NON INFRASTRUKTUR	15

Indikator yang dinilai meliputi unsur-unsur kegiatan yang dianggap paling dominan dalam rangka menunjang keberhasilan operasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Beberapa indikator penilaian yang dapat digunakan adalah sebagaimana dalam Contoh Indikator Aspek Operasional*.

Jumlah Indikator
Jumlah indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan setiap tahunnya minimal 2 (dua) indikator dan maksimal 5 (lima) indikator, dimana apabila dipandang perlu indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian dari suatu tahun ke tahun berikutnya dapat berubah. Misalnya, suatu indikator yang pada tahun sebelumnya selalu digunakan, dalam tahun ini tidak lagi digunakan karena dianggap bahwa untuk kegiatan yang berkaitan dengan indikator tersebut perusahaan telah mencapai tingkatan/standar yang sangat baik, atau karena ada indikator lain yang dipandang lebih dominan pada tahun yang bersangkutan.

Sifat penilaian dan kategori penilaian
Penilaian terhadap masing-masing indikator dilakukan secara kualitatif dengan kategori penilaian dan penetapan skornya sebagai berikut:
Baik sekali (BS) : skor = 100% X Bobot indikator yang bersangkutan.
Baik (S) : skor = 80% X Bobot indikator yang bersangkutan.
Cukup (C) : skor = 50% X Bobot indikator yang bersangkutan.
Kurang (K) : skor = 20% X Bobot indikator yang bersangkutan.

Definisi untuk masing-masing kategori penilaian secara umum adalah sebagai berikut:
Baik sekali : Sekurang-kurangnya mencapai standar normal atau diatas normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu, dsb.) dan kuantitas (produktivitas, rendemen, dan sebagainya).
Baik : Mendekati standar normal atau sedikit dibawah standar normal namun telah menunjukkan perbaikan baik dari segi kuantitas (produktivitas, rendemen, dan sebagainya) maupun kualitas (waktu, mutu, dan sebagainya).
Cukup : Masih jauh dari standar normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu, dan sebagainya) namun kuantitas (produktivitas, rendemen, dan sebagainya) dan mengalami perbaikan dari segi kualitas dan kuantitas.
Kurang : Tidak tumbuh dan cukup jauh dari standar normal.

Mekanisme Penilaian

- Penetapan indikator dan penilaian masing-masing bobot.
Indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian setiap tahunnya ditetapkan oleh RUPS untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum pada pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan perusahaan.
Sebelum pengesahan RKAP tahunan oleh RUPS untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum, Komisaris/Devan Pengawas wajib menyampaikan usulan tentang indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tahun buku yang bersangkutan dan besar bobot masing-masing indikator tersebut kepada Pemegang Saham untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum.
Dalam menyampaikan usulan indikator dan besaran bobot tersebut, Komisaris/Devan Pengawas wajib memberikan justifikasi mengenai masing-masing indikator aspek operasional yang diusulkan untuk digunakan dan dasar pembobotannya.
Dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan, RUPS untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum sekaligus menetapkan indikator operasional yang digunakan untuk tahun yang bersangkutan dan masing-masing bobotnya dengan antara lain mempertimbangkan usul Komisaris/Devan Pengawas tersebut diatas.
Khusus untuk penilaian tingkat kesehatan tahun buku 1998, Komisaris dan Devan Pengawas BUMN yang penilaian tingkat kesehatannya diatur dengan Surat Keputusan ini wajib menyampaikan usul tentang indikator-indikator aspek operasional yang akan digunakan berikut masing-masing bobotnya kepada Direktorat Jenderal Pembinaan BUMN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal Surat Keputusan ini diterbitkan.

Mekanisme penetapan nilai

- Sebelum diselenggarakan RUPS untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum pengesahan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, Komisaris/Devan Pengawas wajib menyampaikan kepada Pemegang Saham untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum penilaian kinerja perusahaan berdasarkan indikator-indikator aspek operasional dan bobot yang

- telah ditetapkan oleh RUPS untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan.
- Dalam menyampaikan usulan penilaian tersebut Komisaris/Devan Pengawas diharuskan memberikan justifikasi atas penilaian terhadap masing-masing indikator aspek operasional yang digunakan.
- RUPS untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum dalam pengesahan laporan keuangan menetapkan penilaian terhadap aspek operasional yang antara lain memperhatikan usulan Komisaris/Devan Pengawas.

6. Contoh Perhitungan

BUMN Pelabuhan (Infrastruktur)

Indikator yang digunakan	Bobot	Nilai	Skor	Unsur unsur yang dipertimbangkan
1. Pelayanan kepada pelanggan/masyarakat	15	B	12	Turn Round Time (TRT), Waiting Time (WT), dab.
2. Peningkatan kualitas SDM	10	C	5	Peningkatan Kesejahteraan, Kaderisasi pimpinan, dab.
3. Research & Development	10	B	8	Kepedulian manajemen terhadap R & D, dab.
T o t a l	35		25	

III. ASPEK ADMINISTRASI

- Total Bobot
- BUMN INFRASTRUKTUR (Infra) 15
- BUMN NON INFRASTRUKTUR (Non infra) 15
- Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya
Dalam penilaian aspek administrasi, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 10 dibawah ini.

Tabel 10 : Daftar indikator dan bobot aspek Administrasi

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Laporan Perhitungan Tahunan	3	3
2. Rancangan RKAP	3	3
3. Laporan Periodik	3	3
4. Kinerja PUKK	6	6
T o t a l	15	15

3. Metode penilaian

a. Laporan Perhitungan Tahunan

- Standar waktu penyampaian perhitungan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus sudah diterima oleh Pemegang Saham untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum paling lambat akhir bulan kelima sejak tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan.
- Penentuan nilai

Tabel 11 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Audit

Jangka waktu laporan Audit diterima	Skor
- sampai dengan akhir bulan keempat sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	3
- sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	2
- lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	0

- Contoh Perhitungan :
Laporan audit terhadap laporan perhitungan tahunan BUMN PT "A" (periode tahun buku 1/1/1997 sampai dengan 31/12/1997) diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) pada tanggal 2 Mei 1998. Sesuai tabel 11 diatas, nilai PT "A" untuk ketetapan waktu penyampaian laporan perhitungan tahunan adalah 2.

b. Rancangan RKAP

- Sesuai ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998, pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998, RUPS untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum dalam pengesahan rancangan RKAP tahunan harus sudah diterima 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan.

Penentuan nilai

Tabel 12 : Daftar penilaian waktu penyampaian rancangan RKAP

Jangka waktu surat diterima s/d memasuki tahun anggaran yang bersangkutan	Skor
2 bulan atau lebih cepat	3
kurang dari 2 bulan	0

Contoh 1 :

Tahun anggaran BUMN PT "A" dimulai 1/1 1999. Rancangan RKAP BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 29 Oktober 1998. Sesuai tabel 12 diatas pada butir diatas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 3.

Contoh 2 :

Tahun anggaran BUMN PT "A" dimulai 1/1 1999. Rancangan RKAP BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 5 Desember 1998. Sesuai tabel 12 diatas pada butir diatas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 0.

c. Laporan Periodik

Waktu penyampaian laporan.

Laporan periodik Triwulan harus diterima oleh Komisaris/ Dewan Pengawas dan Pemegang Saham untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.

Penentuan nilai

Tabel 13 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Periodik

Jumlah keterlambatan dalam 1 bulan	Skor
lebih kecil atau sama dengan 0 hari	3
0 < x <= 30 hari	2
30 < X <= 60 hari	1
> 60 hari	0

Contoh perhitungan

Laporan periodik Triwulan PT "S" periode anggaran 1 Januari s/d 31 Desember untuk tahun penilaian diterima Pemegang Saham untuk Persero atau Menteri Keuangan untuk Perum masing-masing sebagai berikut :

Triwulan	Berakhir periode	Tanggal diterima
I	31/3 199x	5/5 199x
II	30/6 199x	15/7 199x
III	30/9 199x	31/10 199x
IV	31/12 199x	10/2 199x + 1

Perhitungan jumlah hari keterlambatan

- Triwulan I 4
- Triwulan II 0
- Triwulan III 0
- Triwulan IV 9

Jumlah hari keterlambatan 13 sehingga mendapatkan nilai "2"

Catatan :

- Laporan periodik sekurang-kurangnya terdiri dari :
 1. Laporan pelaksanaan RKAP
 2. Laporan pelaksanaan Proyek Pengembangan
 3. Laporan pelaksanaan Anak Perusahaan
 4. Laporan pelaksanaan penugasan (jika ada)
 5. Laporan pelaksanaan PUKK

Kinerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)

Indikator yang dinilai

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Efektivitas penyaluran	3	3
2. Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman	3	3
T o t a l	6	6

Metode penilaian masing-masing indikator

1. Efektivitas penyaluran dana

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Dana yang disalurkan}}{\text{Jumlah dana yang tersedia}} \times 100\%$$

Definisi

Jumlah dana tersedia adalah seluruh dana pembinaan yang tersedia dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri atas :
 - Saldo awal
 - Pengembalian pinjaman
 - Setoran eks pembagian laba yang diterima dalam tahun yang bersangkutan (termasuk alokasi dari dana PUKK BUMN lain, jika ada).
 Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK.

Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari hibah dan bantuan pinjaman, termasuk dana penjaminan (dana yang dialokasikan untuk menjamin pinjaman usaha kecil dan koperasi kepada Lembaga Keuangan).

Tabel 14 : Daftar penilaian tingkat penyerapan dana

Penyerapan (%)	> 90	85 s/d 90	80 s/d 85	< 80
Skor	3	2	1	0

Contoh perhitungan :

Jumlah dana yang tersedia pada BUMN PT "A" dalam tahun 1999 adalah sebesar Rp 10.000 terdiri dari :

- Saldo awal tahun 1999	Rp	500
- Pengembalian pinjaman	Rp	5.000
- Setoran eks pembagian laba selama tahun yang bersangkutan	Rp	4.000
- Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK	Rp	500
Jumlah	Rp	10.000

Jumlah dana yang disalurkan oleh BUMN PT "A" tahun 1999 Rp 3.500 terdiri dari :

- Pinjaman	Rp	3.500
- Hibah	Rp	1.000

Efektivitas penyaluran dana = $\frac{3.500}{10.000} \times 100\% = 35\%$

Sesuai dengan tabel 14 diatas maka skor untuk indikator yang bersangkutan adalah "3"

d.2 Tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman

Rumus :

$$\frac{\text{Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK}}{\text{Jumlah pinjaman yang disalurkan}} \times 100\%$$

Definisi

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman untuk masing-masing katagori kolektibilitas sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. Bobot masing-masing tingkat kolektibilitas adalah sebagai berikut :

- Lancar	100%
- Kurang lancar	75%
- Ragu-ragu	25%
- Macet	0%

Jumlah pinjaman yang disalurkan adalah seluruh pinjaman kepada Usaha Kecil dan Koperasi sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 15 : Daftar penilaian tingkat pengembalian dana PUKK

Penyerapan (%)	> 70	40 s/d 70	10 s/d 40	< 10
Skor	3	2	1	0

Contoh perhitungan

Posisi pinjaman kepada usaha kecil dan koperasi BUMN PT "A" s/d akhir tahun buku 1999 adalah Rp 3.000 juta, terdiri dari (3 juta) :

- Lancar	1.500
- Kurang lancar	500
- Ragu-ragu	900
- Macet	100
Jumlah	3.000

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah sebagai berikut :

- Lancar	1.500	X	100%	=	1.500
- Kurang lancar	500	X	75%	=	375
- Ragu-ragu	900	X	25%	=	225
- Macet	100	X	0%	=	0

Jumlah rata-rata tertimbang = 2.100

Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah
 $\frac{2.100}{3.000} \times 100 = 70\%$

Sesuai dengan tabel 15 diatas maka skor untuk indikator tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah "2".

IV. LAIN-LAIN

- Dalam penilaian tingkat kesehatan BUMN, Direksi diberikan opsi untuk tidak memperhitungkan proyek/investasi pengembangan yang sudah dinyatakan operasi komersial menurut standar Pertanyaan Standar Akuntansi Keuangan atau standar umum yang berlaku untuk BUMN tersebut selama 2 (dua) tahun apabila:
 - Dalam 2 tahun sejak operasi komersial, proyek/investasi pengembangan dimaksud belum mencapai utilitansi sebesar 60% atau;
 - Periode operasi komersial dengan utilisasi diatas 60% dalam satu tahun penilaian kurang dari 9 bulan.
- Dalam hal proyek/investasi pengembangan tersebut tidak diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan, maka Direksi harus memisahkan secara tegas laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laba/rugi dan Aliran Kas untuk proyek/investasi pengembangan dimaksud dari laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya perhitungan tingkat kesehatan hanya didasarkan atas laporan keuangan perusahaan diluar laporan keuangan proyek/investasi pengembangan.

CONTOH INDIKATOR ASPEK OPERASIONAL

INDIKATOR	UNSUR-UNSUR YANG DIJADIKAN PERTIMBANGAN	CONTOH APLIKASI TERHADAP UNSUR-UNSUR YG DIPERTIMBANGKAN	
		BUMN/SEKTOR	UNSUR-UNSUR YG DPT DIPERTIMBANGKAN
1. Pelayanan kepada pelanggan/masyarakat	> Perbaikan kualitas sarana & prasarana untuk kepentingan/kepuasan pelanggan	Pelabuhan	Turn Round Time (TRT), Berthing Time (BT), Waiting Time (WT), dab.
		Pengairan (Perum Otorita Jati-luhur dan Perum Jasa Tirta	Pemenuhan supply air kpd PDAM/industri pengendalian banjir, pengendalian daerah serapan sungai.
	> Perbaikan mutu produk	PLN	Frekwensi pemadaman, lama rata-rata pemadaman, kecepatan pelayanan gangguan.
	> Pengembangan jalur distribusi	Jalan Tol	Kualitas jalan, indikator traffic sign.
	> Penyederhanaan birokrasi yang menguntungkan bagi pelanggan	Garuda/MNA	On time performance.
	> Kecepatan pelayanan	Bandara	Kebersihan terminal bandara, sarana parkir, fasilitas check in.
	> Guidance yang jelas bagi pelanggan	Perkebunan	Rendemen, produksi per hektar, dsb.
	> Peningkatan fasilitas keselamatan bagi pelanggan/pemakai jasa	Kereta Api/pelayaran/penerbangan	Load factor penumpang dan barang, penumpang-kui-ton, dsb.
	> Pelayanan gangguan/troubles.	PLN	Susut teknis, susut distribusi, dst.
	2. Efisiensi produksi dan produktivitas	> Peningkatan utilisasi faktor-faktor produksi/assets idle	Pengairan (Perum Otorita Jati-luhur dan Perum Jasa Tirta
> Peningkatan rendemen		Konsultalan	Men-hour terjual, dab.
> Peningkatan produktivitas per satuan faktor produksi		Pertambangan	Jam jalan kapal keruk, eskavator, dab.
> Pengurangan susut/losses, baik susut teknis, susut distribusi, maupun susut karena faktor lainnya		Perkebunan	Kepatuhan thd aturan penyadapan karet, regenerasi tanaman tidak produktif.
> Peningkatan nilai men-hour			
3. Pemeliharaan kontinuitas produksi	> Kewajiban melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi sesuai persyaratan standar.		
4. Inovasi produk baru	> Efektivitas SDA dengan orientasi jangka panjang	Pelabuhan	Pemeliharaan fasilitas dermaga, pengerukan alur/kalam, dab.
	> Pelaksanaan checking rutin terhadap fasilitas utama	Transportasi	Pemeliharaan sarana transportasi bus, kereta api, kapal atau pesawat.
	> Aplikasi penyediaan alat-alat sesuai dengan batas kapasitas yang direkomendasikan	Kontraktor	Hak patent, hak cipta, temuan metode konstruksi baru, dsb.
5. Peningkatan kualitas SDM	> Replacement sarana dan prasarana yang sudah tidak produktif	Industri kimia dasar	Konsepsi energi, produk2 baru yang prospektif, dab.
	> Kreativitas dalam meningkatkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan	Berlaku umum untuk semua sektor	Penyelenggaraan diklat sesuai kebutuhan Kaderisasi pimpinan. Peningkatan kesejahteraan.
	> Penciptaan produk2 baru yang prospektif	Berlaku umum untuk semua sektor	Kepedulian manajemen terhadap R & D.
6. Research & Development (R&D)	> Peningkatan penguasaan teknologi	Berlaku umum untuk semua sektor	Pencapaian sasaran, efisiensi dalam pencapaian sasaran.
	> Mutu diklat	Berlaku umum untuk semua sektor	Kebersihan lingkungan kerja.
	> Penyelenggaraan pendidikan formal dan informal sesuai kebutuhan (dalam negeri dan luar negeri).	Berlaku umum untuk semua sektor	Reboisasi, AMDAL. Reklamasi daerah eks tambang AMDAL.
7. Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah	> Kaderisasi pimpinan	Berlaku umum untuk semua sektor	Estate regulation, AMDAL.
	> Pendelegasian kewenangan secara berjenjang		
8. Kepedulian terhadap lingkungan	> Konsistensi pelaksanaan reward and punishment.		
	> Proses regenerasi pimpinan.		

[*/Dn/C]

